MAJALAH
Sketsa
Suara Kritis & Edukatif Mahasiswa
EDISI 42 | MEI 2022

MERAPAL MAKNA JADI PEREMPUAN

Dalam Gelanggang Penanganan Kekerasan Seksual

Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Unmul

Kian Lantang Eksistensi untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

DAFTAR ISI

SALAM PERS 1
STRUKTUR LEMBAGA 2

Laporan Utama

Dalam Gelanggang Penanganan Kekerasan Seksual 3

Laporan Utama

Menangkal Narasi Keliru Perihal Perempuan 9

Laporan Utama

Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Unmul 13

WANSUS

Sri Murlianti: Pergerakan dalam Kemanusiaan, Menyelisik Wacana Terselubung 16

LIFESTYLE

Tak Mesti Dilema Ingin Cantik atau Pintar 20

OPINI

Langgeng Bias Versus Konstruksi Sosial di Indonesia 22

SOSOK

Evi Susanti: Piawai dan Dedikasi dalam Bekerja 24

IPTEK

Kian Lantang Eksistensi untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 26

PUISI

12-01*
San diingat I 29

CERPEN

Mengapa Tidak Jadi Ketua? 31

INFOGRAFIS

Pengalaman Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Mahasiswa Unmul 34

KOMUNITAS

HWDI Kaltim, Rini: Rentan Bukan Berarti Tak Mandiri 43

LENSA

Potret Perempuan Melalui Aksi Kamisan Kaltim 46

MAJALAH Sketsa
Suara Kritis & Edukatif Mahasiswa

#Edisi42

Salam Persma!

Membahas perempuan artinya membahas ruang aman, kesetaraan, juga pemberdayaan. Pada distraksi media baru, produksi pesan tak ayal dipengaruhi oleh sosial, budaya, hingga pasar. Maka tak pelak apabila narasi keliru masih langgeng di pikiran mereka yang tak ramah pada perspektif gender.

Beban ganda perempuan adalah bahaya laten. Namun, ia sering ditampik dan dianggap baik-baik saja. Kesadaran ini seharusnya menular dan membangun semangat dalam gerakan. Alih-alih berkolaborasi, perempuan dipertanyakan pilihannya dan dipertukarkan kompetensinya untuk berkompetisi dengan sesama perempuan. Meski begitu, perempuan punya caranya sendiri menghadapi runyam, untuk kembali menakhodai otoritas atas tubuh dan pikiran mereka.

LPM Sketsa Unmul turut menghadirkan kiprah dan langkah perempuan dalam kata, data, dan lensa pada Majalah Edisi 42.

Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa Universitas Mulawarman

Gedung Student Center Unmul Lt. 2
Jl. Barong Tongkok, Samarinda 75123

Sampul:
Putri Amalyah Jahra

Layouter Majalah:
Muhammad Upi Arjuna
Jeni Ananda Nur Islam
Khittah Muslimah
Reza Ferdyan
Lasmaria Melyani

Illustrasi Majalah:
Dirga Satriansyah Amin

LPM Sketsa Unmul
@Sketsaunmul
sketsaunmul@gmail.com
sketsaunmul.co
@sev9744k
sketsaunmuldotco

Download Majalah PDF Sketsa edisi #41 di:
sketsaunmul.co

STRUKTUR
LEMBAGA PERS MAHASISWA
SKETSA UNMUL 2020

Pelindung	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Penasihat	Dr. Ir. Encik Ahmad Syaifudin., MP
Pembina	Dr. Rina Juwita, S.IP., M. HRIR. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
Ketua Umum	Muhammad Razil Fauzan
Sekretaris	Nurvidya Sistha Azzahra
Bendahara	Muhammad Adil Alparizi
Ketua Redaksi	Restu Almalita
Redaktur Pelaksana	Khoirun Nisa Nindiani Kharimah
Redaktur Online	Novia Rahmawati Ananda Efrianti Muhnizar Sari
Reporter	Enggal Triya, Hasanah, Alya Hanifah, Hasanah, Andi Berbi, Shania Lutfiah, Julia Oriana
Fotografer	Sari Dewi Handayani, Erzha Tegar Hati, An Nisa
Desainer	Muhammad Upi Arjuna, Nanda Billah Aliffia, Dirga Satriansyah Amin, Reza Ferdyan, Putri Amalyah Jahra, Siregar, Lasmaria Melyani, Khittah Muslimah
Videografer	F. Sandro Asshary
Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	Jeni Ananda Nur Islam
Koordinator Sub Penelitian	Muhammad Ridi Syaputra
Koordinator Sub Pengembangan	Siti Rahmi
Anggota	Andi Rizky Amalia Syahrir, Yasmin Dieva Islamiyah, Rhaudatul Fitri, Atirah Keimas
Staf Magang	Agnes, Guinet, Audrey, Diva, Firda, Firza, Halimatus, Ida, Khansa, Lamriama, Lely, Luthfi Rahman, Marcello, Masriani, Fikran, Luthfi, Saudi, Syafi'I, Rhiska, Rivani, Silmi, Siti Aisyah, Siti Nurmasyitah, Viola, Virdha, Wisda, Army, Aqwam.

Ilustrasi: Freepik

Dalam Gelanggang Penanganan Kekerasan Seksual

"Bak fenomena gunung es, kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi jauh lebih banyak dari apa yang terlihat pada permukaan."

Begitulah gambaran kasus kekerasan seksual, tak terkecuali di pendidikan tinggi. Unmul tak lepas jadi sorotan. Terpantau oleh Sketsa, kasus kekerasan seksual di Unmul kembali merebak. Sejumlah desas-desus hadir, dan berujung pada Aksi Usut Tuntas Kekerasan Seksual di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul, Kamis 20 Januari 2022 lalu bertempat di depan rektorat. Pemberhentian tidak hormat menteri Kajian dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) yang dilakukan GAI pada 26 Februari 2022 lalu. Meski begitu, kasus yang belum disuarakan boleh jadi lebih banyak.

Sebelumnya survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada 2020 memaparkan, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan. Adapun 27 persen dari aduan itu terjadi di universitas. Di sisi lain, hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PuSHPA) Unmul bekerja sama dengan BEM Fakultas Hukum (FH) mendapati, 64,7 persen dari 215 responden memilih tidak melaporkan tindak kekerasan seksual.

Sketsa berbincang dengan salah satu korban pelecehan seksual di kampus. Sampai hari ini, Citra (bukan nama sebenarnya) masih harus bergulat dengan ketakutan saat mengendarai motor, sebab seseorang tak dikenal memegang bagian dadanya. Itu terjadi pada Desember 2021 di area kampus dengan kondisi lampu jalan yang redup menjelang

magrib. Citra sempat melihat senyum pelaku sekilas, sebelum sumpah serapah dikeluarkan di jalanan yang lengang dan minim penerangan.

"Kalau sekarang itu rasanya di depan orang-orang, kaya baik-baik aja. Tetapi ketika pas di jalan itu sudah enggak tenang. Betul-betul ketakutan, trauma apa segala macam syok gitu," keluhnya kepada Sketsa, Kamis (7/4).

Tak hanya sekali, Citra mengaku mengalami kembali beberapa kejadian serupa dan gagal mendapati pelat nomor kendaraan pelaku. Rentet kejadian itu, membuatnya menyoroti keamanan kampus. Upaya pelaporan mulanya hendak ia ajukan, tetapi urung. Perkara ketidaksiapannya berbagi hingga ragu terhadap sikap kampus menjadi faktornya.

"Salah satu (penyebab) terjadinya kekerasan seksual kayak gini kan, lampu-lampu di jalan nyala enggak? CCTV di jalan ada enggak? ya, gimana kita mau dapat pelakunya, sementara ketika korban yang ngomong sudah (kadung) terjadi," geramnya mengamati upaya pencegahan yang dilakukan Unmul.

Siang itu di kampus, Citra turut berbangga kepada mahasiswa yang kerap menyuarakan kasus kekerasan seksual. Besar harapan agar Unmul progresif dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, utamanya prasarana yang dapat memberikan ruang aman bagi mahasiswa.

"Bagaimana caranya dia (rektor) sebagai pemimpin mengubah sistem yang lama menjadi sistem yang baru, supaya keamanan di Unmul tetap terjaga dan kekerasan (seksual) kayak gitu enggak terjadi. Apa yang hari ini terjadi, itu sebagai bahan evaluasi, bukan dibiarkan."

Kasus kekerasan seksual juga terjadi dalam hubungan romansa yang bermula pada 2016, dan diungkap korban pada 2019 silam. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, AFR, mulai ramai ketika dirinya diketahui menjadi pembicara pada agenda International Women's Day saat ia sendiri berstatus sebagai pelaku.

Meski dilanda berbagai kendala, Bella (bukan nama sebenarnya) membagikan kisahnya kepada Sketsa. Kegeramannya itu memberikan keberanian untuk bersuara pada 2020. Terlebih ketika dirinya mengetahui terdapat tiga korban lain. Bella sendiri mengaku mendapat berbagai bentuk kekerasan seksual selama menjalani hubungan. Mulai dari kekerasan verbal dan non verbal yang tak ayal menimbulkan gangguan psikis.

"Ya memang untuk keluar dari hubungan yang toxic, bahkan hampir tiga tahun berhubungan dengan dia, butuh perjuangan yang sangat-sangat luar biasa," ungkapnya pada Selasa (14/4).

Ketika itu, kasus ini sempat menyeruak di media, utamanya Instagram sebagai wadah Bella untuk mendapat keadilan. Dalam penuturannya, pelaku merupakan seorang yang berpengaruh di organisasi mahasiswa dan aktif di gerakan rakyat, aksi, hingga kajian. Namun, bagi Bella, itu menjadikan AFR manipulatif terhadap korban.

Selain buka suara melalui Instagram, upaya yang ditempuhnya ialah membuat laporan kepada sejumlah organisasi yang menaungi pelaku. Keberanian itu membuahkan hasil dengan tanggapan yang positif, hingga sidang organisasi secara internal turut direncanakan. Kendati absennya pelaku ketika itu mengakibatkan persidangan batal.

"Aku membaca buku-buku tentang perempuan, mempelajari bagaimana perjuangan perempuan untuk bebas dari patriarki, bebas dari standar kecantikan, itu aku pelajari melalui organisasi-organisasi perempuan. Tapi kenapa saat pelecehan seksual terjadi di aku, sangat sulit untuk

aku melaporkannya, padahal ketika itu terjadi di orang lain aku bisa dengan lantang mengatakan harus berani keluar," kisahnya ketika ditanya perihal ketakutan melapor.

Upaya untuk dapat pemulihan diakuinya memakan kurun waktu setahun. Selain menciptakan ruang aman untuk diri sendiri, ia sering berkomunikasi dengan orang-orang yang dipercaya. Terlebih hingga saat ini kerugian yang diterimanya belum menuai hasil yang jelas.

Sanksi sosial menjadi hukuman yang tepat terhadap pelaku. Pelaku tidak boleh diberi ruang dalam forum, agenda, hingga lembaga yang menaungi. Terlebih ketika itu regulasi dan payung hukum penanganan belum hadir bagi korban kekerasan seksual (KS).

"Hari ini kita patut merayakan juga bahwa RUU TPKS sudah disahkan menjadi UU TPKS. Bahwa hari ini kekerasan seksual sudah ada payung hukumnya, bagi mereka yang mengalami kasus kekerasan seksual sudah tahu melapor ke mana karena UU sudah ada dan jelas."

"Adanya PPKS (di lingkungan kampus) menjadi kekuatan yang besar bagi korban, karena aturan jelas bahkan pelaku tidak segan-segan dipecat jika korban ingin pelaku dipecat dari kampus. Jadi sangat jelas perbedaan ketika kasus kekerasan seksual memiliki payung hukum karena korban tak lagi direndahkan," lanjutnya.

Implementasi dari Permendikbud PPKS di Unmul diharapkannya dapat segera terlihat. Terutama dengan hadirnya posko-posko pengaduan di setiap fakultas diiringi spanduk bertuliskan Kawasan Bebas Kekerasan Seksual, misalnya. Selain itu, kementerian gender di badan BEM KM yang tak terlihat pun dianggap Bella sebagai bentuk kemunduran. Sebab fungsi dari kementerian itu dapat menjadi penguat bahwasanya edukasi gender masih menjadi momok dan tak terlepas dari isu kemanusiaan.

Ihwal enggannya korban bersuara hingga saat ini, ia mewanti-wanti agar korban tak tergesa-gesa mengambil tindakan dan tak memelihara rasa bersalah atas diri sendiri. Pentingnya menyuarakan kesadaran akan kekerasan seksual yang mengintai ini menjadi upaya kolektif. Ia pun tak ragu untuk memberikan dukungan bagi korban yang masih bungkam.

"Kita harus bergandengan tangan karena tidak mudah menciptakan ruang aman, jadi jangan sesali pengalaman hidup kita, tetap kuat, dan tetap (berupaya dalam) menciptakan ruang aman korban KS. Jangan beri ruang untuk pelaku dan jangan ada kata tidak untuk membasmi predator KS di luar sana."

Unmul Berpacu dalam Permendikbud PPKS

Belum jemu, Sketsa kembali menemui Encik Akhmad Syaifudin selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR 3), untuk menilik sejauh apa upaya yang ditempuh Unmul dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Keprihatinan menyoal kasus yang telah terjadi di kampus disebutnya lantaran Unmul merupakan lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi refleksi dalam menghasilkan pribadi berkarakter mulia.

Sebelum hadirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 atau PPKS, Unmul bak berada pada dilema dalam penanganan kekerasan seksual. Sebab pedoman prosedur penanganan belum dimiliki. Encik mengungkap, dalam penanganannya butuh prosedur sejalan dengan aturan hukum. Setiap perkara, perlu penyelesaian dengan cara yang berbeda, utamanya disertai dengan laporan atau pengaduan terlebih dulu.

"Kalau tidak ada yang mengadu artinya belum terjadi, walaupun mungkin misalnya mohon maaf ya, ada omongan tapi tidak ada yang mengadu itu belum masuk kategorinya ya. Harus ada yang mengadu, harus ada yang tersinggung, merasa jadi korban," paparnya Rabu (30/3).

Namun, beber Encik, seluruh laporan yang masuk bakal ditampung oleh WR 3 untuk diproses, meski implementasi Permendikbud PPKS belum rampung di kampus yang baru saja menyabet posisi perguruan tinggi terbaik di Kaltim, versi Webometrics ini.

"Prosesnya itu lambat, karena memang prosedurnya itu step by step gitu ya, karena kawan-kawan yang ingin menyelesaikan juga tidak ingin kesandung ya, kalau misal menyelesaikannya ceroboh khawatirnya nanti salah langkah," terangnya ketika ditemui.

Hadirnya Permendikbud PPKS bak angin segar beranjak mewujudkan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Meski Unmul menerangkan menyambut baik, agaknya proses merampungkan cukup senyap. Saat ini saja, masih berkutat pada pelatihan Panitia Seleksi Satuan Tugas (Pansel Satgas) PPKS Unmul.

Unmul tengah menunggu pengumuman dari Pusat Penguatan Karakter untuk mengumumkan daftar siapa saja yang lulus dalam pelatihan. Usai hal itu, Unmul meneruskan nama-nama tersebut untuk kemudian dilakukan Uji Publik. Daftar nama itu disebut akan disertakan transparansi latar belakang atau track record. Sehingga masyarakat mengetahui siapa saja mereka yang akan menjadi bagian dari penanganan kekerasan seksual di kampus. Usai tuntas pada tahap Pansel, Encik mengaku tahap selanjutnya beralih kepada Satgas PPKS Unmul.

Lembaga itu, dikabarkan bekerja dengan berpedoman pada aturan Permendikbud, ihwal pengaduan, meneruskan pengaduan, hingga pemulihan. Sementara dalam upaya pencegahan, edukasi sebagai langkah, mengingat masih banyak yang belum paham secara komprehensif terkait kekerasan seksual, baik berupa jenis hingga langkah pengaduan.

Ia bertutur, baik dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa hendak proaktif dalam penanganan kekerasan seksual di Unmul. Utamanya menyoal edukasi dan etika untuk saling menjaga agar tindak kekerasan seksual tidak terjadi lagi, tak terlepas dari pelecehan secara verbal. Itu juga sebagai wujud implementasi dari Kampus Merdeka episode 14: Merdeka dari Kekerasan Seksual.

Dirinya mengimbau kepada para korban agar tak ragu melapor. Namun, lokalisasi perkara juga diharapkan mampu membantu mewujudkan kampus aman. Segala persoalan tidak ditangani sendiri oleh WR 3, melainkan diselesaikan secara bertingkat. Melalui tataran program studi terlebih dahulu, kemudian fakultas, lalu dibawa ke tingkat universitas.

"Jadi kita harus memastikan syarat-syarat formal dalam pengaduan dan sebagainya dibuat oleh yang bersangkutan. Jadi hal seperti itu yang kita edukasi kalau mau mengadukan."

Gerakan Penanganan Kekerasan Seksual

Di Unmul terpantau sejumlah gerakan yang diinisiasi civitas academica sebagai upaya

penanganan kekerasan seksual. Mulai dari intensnya diskusi yang diadakan oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Kaltim, pembentukan Posko Kekerasan Seksual oleh BEM FH bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PuSHPA), hadirnya kementerian gender yang berada pada tataran BEM, seperti FISIP, sampai lembaga kajian gender yang aktif dalam benang merah edukasi. Upaya ini tentu bisa menjadi sinergi yang baik, utamanya pada konteks perguruan tinggi.

Terang Wahyuni, menteri Gender BEM FISIP, bahwa tak hanya FISIP, lembaga di seluruh fakultas perlu terlibat dalam penanganan kekerasan seksual. Mesti ada orang-orang yang menyuarakan, paham mengenai gender dan permasalahannya, tak hanya perempuan, laki-laki juga dapat melibatkan diri.

Penting untuk memahami perihal kategorisasi kekerasan seksual untuk ambil sikap dalam penanganan lebih lanjut. Selain itu kementerian gender sendiri harus tegas terhadap pelaku, tanpa adanya pemakluman.

"Siapa pun kamu yang menjadi korban, tetap kuat, kamu hebat masih bisa berdiri saat ini. Kamu bukan barang yang rusak, kamu harus memperjuangkan hak-hakmu yg direnggut," pesannya Selasa (5/4) lalu.

Selain itu, ada pula Posko Kekerasan Seksual di Unmul. Inisiasi ini berangkat dari BEM FH dengan menggandeng PuSHPA Unmul. Saat ini tengah berada pada tahapan hasil survei.

Disiarkan melalui YouTube FH Unmul, bagi PuSHPA, survei itu sebagai respons terhadap Permendikbud PPKS, melihat bagaimana penanganan kekerasan seksual sejauh ini di Unmul, serta bagaimana tanggapan civitas akademica. Publikasi dalam bentuk jurnal turut direncanakan guna memudahkan masyarakat mengakses hasil tersebut.

"Yang menjadi responden tidak hanya mahasiswa, tetapi warga kampus yang ada di Unmul. Dari hasil survei tersebut diketahui juga gimana saksinya terhadap kekerasan seksual di Unmul, bagaimana progres unmul, bagaimana yang diketahui oleh kita selama ini ketika ada kasus kekerasan seksual kita seperti apa. Melalui survei kemarin cukup tergambar lah," beber Orin Gusta Andini, bagian dari penelitian PuSHPA pada Sabtu (2/4).

Hadir sebagai bagian dari FH Unmul, PuSHPA berdiri sebagai lembaga yang memiliki fokus terkait perempuan dan anak. Upaya PuSHPA melakukan

kajian dan survei terkait Permendikbud PPKS sebagai dukungan dalam mendorong kampus menjadi ruang aman dari tindak kekerasan seksual.

Belum adanya survei serupa sebelumnya, agenda ini sebagai langkah awal dan diharapkan bisa

depannya dengan jumlah responden dan partisipasi yang lebih banyak.

"PuSHPA memberikan dukungan penuh kepada upaya pembentukan Satgas, dan berharap segera ada pendaftaran seleksi anggota Satgas agar anggota PuSHPA dapat ikut."

Tim liputan: Khoirun Nisa, Yasmin Dieva Islamiyah, Khansa Yumna Abiyyu, Siti Aisyah, Muhammad Luthfi Nauval Nur Orfakha, Andi Berbi Ollan Yunus.
Editor: Restu Almalita

Ilustrasi: Freepik

Menangkal Narasi Keliru Perihal Perempuan

Dalam hambatan menggapai ambisi, perempuan punya cara bernegosiasinya sendiri, punya cara mendobrak salah kaprah soal perempuan yang 'mungkin' selama ini langgeng di pikiran sebagian orang.

Salah satunya adalah Faridah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) 2018, yang dipaksa melanjutkan kuliah dan bercerai di usia 23 tahunnya. Pasalnya, Faridah bertekad melanjutkan karier, alih-alih melanjutkan pendidikan tingginya itu. Namun, orang tuanya ingin anak bungsunya mengenyam dunia kuliah sebagaimana anak-anak lain.

Ihwal itu mula-mula tak dikabulkannya, dengan dalih bekerja dan belajar bahasa asing di Jawa selama dua tahun. Kendati sepulangnya, Faridah melunak dan berkuliah di Unmul hingga saat ini—itu juga yang menyebabkan ia gap year. Paksaan tersebut bukan satu-satunya yang dialami Faridah. Sejak sekolah dasar, orang tuanya kerap menjodohkannya. Membuat dirinya harus mencari cara untuk menolak dan menghindar.

Hingga tahun ketiga menjadi mahasiswi, ia tak lagi dapat mengelak perjodohan itu. Sang kakak, yang pada dulunya jadi tameng, kini menjadi perantara dalam memperkenalkan calon suami untuknya.

"Pada akhirnya aku dijodohin sama temannya kakakku, teman satu kerjanya, yang katanya sudah dipercaya betul sama kakakku. Walaupun aku sudah menolak dengan cara apapun tapi aku tetap enggak bisa, karena aku berpikir (pilihan) ini dari kakakku dan orang tuaku," ungkapnya pada awak Sketsa, Rabu (23/3) melalui Zoom Meeting.

Pada 2020 pernikahannya berlangsung. Salah satu keinginannya adalah menikah dengan wedding dreams-nya sendiri. Itu tetap diupayakannya, meski impian terbesar—tentu adalah menikah dengan pasangan yang ia pilih sendiri, harus lenyap tak bersesuai dengan properti mewah pernikahannya.

Usia pernikahannya dua bulan. Komunikasi antarpasangan ini sebelumnya bergulir sunyi. Segenap upaya untuk meladeni dan mengajak berdiskusi sudah dilakukan Faridah. Namun, dirinya tak tahu latar belakang suami: apakah sang suami juga menikah sebab terpaksa memenuhi permintaan orang tua sebagaimana dirinya?

Faridha
Mahasiswi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Unmul

"Suami ku umur 36 tahun pas nikah, umurku kemarin 22 tahun pas nikah, 23 tahun sekarang. Aku menikah juga enggak tahu keluarganya kaya gimana, orang tuanya gimana, rumahnya di mana. Aku (pada akhirnya) benar-benar percaya sama (pilihan) orang tua pasti bagus, dan aku enggak mau mencari tahu juga. Akhirnya, ya sudah selesai semuanya," paparnya saat itu.

Perceraian secara agama pun dipilih, usai menempuh berbagai cara saat menghubungi dan menemui sang suami, hasilnya nihil. Ia putus kontak dengan mantan suami. "Karena berhubung mantan suamiku juga enggak tahu di mana, benar-benar hilang."

Cerita lain datang dari Tampubolon, Winda Santa Brisa. Mahasiswi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 2018 ini, sudah kenyang dengan cemooh sekitar lantaran mulai aktif di dunia gimnastik. Mulanya ia kerap mengikuti olahraga berkelompok seperti basket, tetapi ia mulai nyaman dengan gimnastik sebab sesuai dengan kebutuhannya untuk fat loss.

Sejak sekolah dasar hingga kini, ia kerap dijadikan bahan bercanda karena memiliki tubuh gemuk dan paha besar. Itu membawanya rajin berolahraga karena menginginkan postur tubuh yang ideal, terutama untuk kesehatannya. Upaya itu bukannya mendapat apresiasi, malah berujung dialog-dialog merendahkan.

"Lengan kamu itu besar banget, itu paha kamu besar banget, ih kok pakaianmu kaya gitu sih. Kadang bernada seksual, aku blokir langsung," pada Sketsa, Senin (4/4) Winda yang santer mendapat komentar dalam direct message (DM) itu bercerita.

Tujuannya memperbaiki postur tubuh melalui olahraga tak dimungkiri adalah untuk mendapat validasi, bahwa bagaimanapun, ia perempuan yang ingin dihargai. Belum saja hasil itu didapat sebagai pembuktian, ia terjegal stigma.

Alih-alih mendukung proses, orang sekelilingnya salah fokus dengan sport bra yang kerap ia pakai saat gimnastik. Menganggap pakaian itu untuk mencari atensi dibanding kenyamanan. Hal itu menambah rentet ketakutan bagi Winda untuk tampil di depan umum, karena seakan tak diberi otoritas atas tubuhnya.

Belakangan, ia mengetahui orang terdekatnya menggunjing lewat obrolan grup. Tak jarang komentar itu telak di depan wajahnya, "misal ketemu teman-teman kuliah, (mereka bilang) kamu gila sih sekarang nge-gym, iyalah Winda pakaiannya ngeri-ngeri," ungkapnya mengingat komentar yang datang padanya.

Satu lagi kepingan cerita dari cara perempuan menggapai kemauannya, datang dari Rani Berliani, mahasiswi Ilmu Komunikasi FISIP 2021. Tahun awal kuliahnya menjadi rantauan, kerap disepelekan. Kepercayaan dirinya mengartikulasikan cita-cita sering diragukan oleh orang sekitarnya.

Rani hendak menjadi wirausaha, usia muda yang dinilai sekelilingnya mentah akan pengalaman itu, menjadi lecutan semangat untuknya. "Dari situ saya mulai belajar, kalau misalnya saya tidak bisa di bidang tertentu apa yang saya sukai atau tidak sukai

itu tidak bisa, saya akan pelajari dulu," ujarnya Selasa (30/3) pada awak Sketsa melalui pertemuan virtual Zoom Meeting.

Hingga kini, ia merintis perlahan upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi pengalaman dan juga dana lewat program magang di salah satu usaha konveksi. Bagi Rani, penting untuk perempuan mendapat akses yang memadai dan inklusif tanpa memandang gender. Itu berkaca sebab dirinya tak punya cukup ruang mengeksplorasi hal baru di awal perkuliahan.

Rani Berliani
Mahasiswi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Unmul

Upaya Mereka dalam Mendobrak Anggapan

Faridah, Winda, dan Rani hanya segelintir potret perjalanan perempuan untuk mendapati renjananya. Komentar yang sering mereka hadapi itu, tak memandang gender dan kedekatan. Bisa datang dari mana dan siapa saja. Namun, mereka punya caranya sendiri bernegosiasi dalam upaya mendobrak anggapan-anggapan keliru perihal perempuan.

Sebelum akhirnya menerima perjodohan, Faridah enggan pulang ke kampung halamannya, Kutai Kertanegara, dan memilih menetap di Samarinda. Selain itu, ia punya cara unik dalam berkomunikasi pada kedua orang tuanya, sebab diam dan menghindar saja dirasa tak dapat menyelesaikan masalah. "Aku sampai pernah presentasi di depan orang tuaku, aku bikin kertas (catatan) yang aku jelaskan satu-satu. Kalau misalnya aku sama dia, aku bakal seperti ini lo, dan ini."

Tampubolon Winda Santa Brisa
Mahasiswi Pendidikan Geografi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Unmul

Menanggapi perceraian yang belum kunjung rampung, ia mengaku pelabelan menjadi janda itu ada. Utamanya saat membantu sang ibu berjualan di kampung halaman. Bagi Faridah, meski tetangga berpikir hidupnya tak beruntung, bagaimanapun, ia masih muda, mampu mengambil banyak ruang dalam mengekspresikan diri.

"Aku 23 tahun, aku masih bisa mencari pengalaman yang lain. Aku enggak punya anak. (Dulu) aku terlalu mengikuti omongan orang-orang di sekitarku, sekarang masa bodoh, aku sudah melewati semuanya," sahut perempuan yang kini berada di semester delapan itu.

Sebagaimana Faridah, Rani memilih untuk mengomunikasikan keinginannya secara persuasif. Meski mendapat komentar beragam kala bersuara soal keinginannya, ia tak kapok menjelaskan pada orang lain bahwa kesempatan yang dimiliki perempuan dan laki-laki setara, dan tak perlu memberi perlakuan khusus pada salah satunya. Berkomunikasi secara asertif juga dilakukannya guna menghindari konflik.

"Musyawarah kepada keluarga, tidak dengan cara yang bentak-bentak atau ribut, itu biasanya bisa dapat jalan tengahnya. Maunya saya ini, jadi beri tahu nanti hambatannya seperti ini, lalu jalan keluarnya ini. Jadi dengan berkomunikasi, biasanya suatu hal yang menurut kita janggal atau enggak bisa kita dapatkan, biasanya itu ada jalannya dengan berkomunikasi.

Winda, masih memelihara ketakutan untuk tampil di depan umum sebab merasa tersisih, tapi ia tak stagnan. Ia kerap mengikuti isu-isu terkini di media sosial, menghabiskan waktu bersama orang terdekat yang mendukung, termasuk sang ibu. Kecilnya ruang

di-bully, dianggap remeh, (muncul keinginan) membuktikan. Kalau kamu mau fat loss, pengen badanmu lebih kuat, itu harus angkat beban, enggak bisa hanya cardio. Selama kamu bisa mengerti alat-alat (gym) yang kamu gunakan, kamu bisa lakukan sendirian, enggak kaya basket, badminton, atau bahkan futsal," ungkapnya menegaskan sesuatu yang ingin diraih harus dibuktikan lewat aksi.

Ruang Gerak Perempuan dalam Kacamata Akademisi

Sketsa berbincang dengan Yayuk Anggraini, yang mendedikasikan diri menjadi Ketua Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Unmul. Melalui penuturannya, perlu kehati-hatian dalam mencermati ruang gerak perempuan saat ini. Pasalnya, menaruh anggapan perempuan sebagai manusia tak berdaya hanya akan berujung pada bias gender yang makin besar.

Yayuk Anggraini
Ketua Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unmul

Apabila menyangkut dua pihak sebagaimana perjodohan, misalnya. Motif pihak perempuan maupun laki-laki patut ditinjau secara saksama. Hal itu bertujuan untuk memahami hak hidup sesama manusia tanpa memandang gender. "Tidak selalu memposisikan perempuan menjadi korban atau tertindas, meskipun dalam hal ini ia jelas-jelas menjadi korban. Namun, demikian saya percaya bahwa perempuan di sini memiliki ruang gerak untuk bernegosiasi (menyangkut perjodohan)," ujarnya pada Sketsa, Rabu (6/4).

Selain ketelitian dalam menilik motif, reproduksi pesan terkait ruang gerak perempuan ini diakui Yayuk bergantung pada cara berpikir. Mengungkap dan memberi kesempatan perempuan untuk membicarakan pengalaman juga pemikirannya, hingga bernegosiasi terhadap permasalahan yang dihadapi, adalah salah satu yang dapat diupayakan, utamanya di pendidikan tinggi.

Terlebih banyaknya kultur yang membangun Indonesia, menjadikan keragaman perlu dijaga. Menyamaratakan perempuan dari kultur yang berbeda, juga tak bisa sekonyong-konyong dilakukan. Sebab ada perbedaan cara pandang dalam melihat potensi perempuan berdasar budaya di mana ia berasal. Perlu wacana dan reproduksi pesan yang memberdayakan sesama perempuan. Bagaimanapun, bagi Yayuk, konstruksi sosial perempuan menjadi masyarakat nomor dua terbangun dari hadirnya konsep maupun teori itu sendiri.

LP2M dalam hal ini mengakomodasi topik-topik segar mengenai perempuan. Mulai dari diskusi, penelitian, hingga penerbitan buku. Meski diakuinya Unmul belum memiliki program studi khusus berkenaan dengan gender.

"Dari kegiatan-kegiatan seminar untuk mahasiswa dan dosen, penelitian, penerbitan buku oleh LP2M ini akan memberi amunisi baru buat kita semua sehingga para mahasiswa sendiri akan semakin peka dalam membaca soal perempuan maupun laki-laki, sehingga bisa diaplikasikan dalam (misalnya) KKN, tugas-tugas kuliah, maupun skripsi," kuncinya.

Tim Liputan: Restu Almalita, Ana Monika Guinet, Wisda Aprilia Syaka, Shania Lutfiah
Editor: Nindiani Kharimah

Foto: Sari/Sketsa

Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Unmul

Meski perempuan dapat terlibat dalam posisi strategis, namun perlu ada upaya dan sistem yang memberi dorongan bagi peran dan suara perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis tentu akan memberi andil terhadap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan Unmul, mengingat perempuan dan laki-laki memiliki perspektif yang berbeda, baik yang terbentuk oleh dimensi biologis atau dimensi sosial budaya. Dengan demikian, keterlibatan dan kiprah perempuan di lingkup perguruan tinggi sangat penting. Namun, tak dapat dimungkiri, keterlibatan dan representasi perempuan belum maksimal di Unmul.

Syarifah Hudayah
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Itu turut dibenarkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Syarifah Hudayah. Menurutnya meski Unmul telah memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan, pemenuhan target itu tak bisa dielu-eluka

"Sebenarnya kalau bicara Unmul sih diharapkan wanita bisa memenuhi 30 persen dan juga di instansi lain. Tapi sebenarnya Unmul sudah memberikan kesempatan bagi perempuan, terbukti walaupun belum mencapai 25 persen tetapi tetap diberi kesempatan untuk memimpin baik di tingkat fakultas, namun masih belum memenuhi kapasitas 30 persen" sebutnya pada Rabu

(12/4).

Dari tiga belas fakultas di Unmul, setidaknya dalam pantauan Sketsa, terdapat tiga perempuan yang menduduki kursi dekan. Selain FEB, Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) turut dipimpin oleh perempuan. Tak berhenti sampai di tingkat fakultas, kehadiran perempuan sebagai orang nomor satu pada masing-masing program studi juga tak bisa dibilang sedikit. Itu belum menyinggung jajaran rektor di Unmul.

Retno Haris
Ketua PuSHPA

Pada fakultas yang ia pimpin, Syarifah menuturkan setidaknya tiga hingga lima posisi diisi oleh perempuan. Pengalaman itu membuatnya yakin bahwa seorang perempuan pun mampu menduduki posisi strategis.

Meski gender tidak mempengaruhi kualitas kepemimpinan seseorang, ia melihat banyak indikator yang menyebabkan dominasi ruang bagi laki-laki di lingkungan kampus. Hal itu tak terlepas dari strata pendidikan, kinerja, ilmu, pengalaman, sikap, sampai rasa percaya diri yang tak dapat digeneralisir.

Minimnya kiprah perempuan pada komposisi kepemimpinan direpresentasikan pula melalui survei yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Anak (PuSHPA) Fakultas Hukum (FH) Unmul bertajuk "Kiprah Perempuan Akademisi di Universitas Mulawarman". Itu diinisiasi untuk melihat potret peran akademisi perempuan di Unmul. Hasil survei itu menunjukkan masih adanya salah persepsi terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang.

Afra Tustini Ekawati
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaaan Unmul

"Ketika hadir di satu forum kesannya adalah 'wah ini ada yang jadi seger nih kalau ada perempuan,' itu kan kesannya menjadi membedakan perempuan dan kemudian memandang perempuan itu sebagai kelas yang berbeda, situasi-situasi ini yang sebenarnya membuat perempuan menjadi ragu untuk mengajukan diri," sebut Haris Retno selaku Ketua PuSHPA, pada Kamis (6/4).

Rendahnya upaya afirmatif itu diikuti minimnya keterlibatan perempuan dalam kontestasi pejabat di Unmul. Mulai dari nihilnya kebijakan Affirmative Action atau kebijakan khusus sementara, yang mengharuskan ada posisi perempuan sebagai pejabat di pimpinan Unmul. Kebijakan itu seharusnya telah diterapkan, sebab bagi Retno, kiprah perempuan di lingkup perguruan tinggi menjadi penting.

Sebelumnya Sketsa mewawancarai Afra Tustini Ekawati pada Selasa (4/4) lalu, selaku perempuan pertama Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmul. Dalam pandangannya, kondisi saat ini telah menerima perempuan untuk memangku berbagai peran, utamanya dalam konteks kepemimpinan. Posisi yang saat ini ia jalani, merupakan salah satu bentuk terbukanya kesempatan bagi kepemimpinan perempuan di Unmul. Dirinya menyebut beberapa dekan perempuan dan Ruslima sebagai perempuan yang pernah menduduki posisi wakil rektor.

Sebagaimana penuturan Syarifah, Afra mengakui terbukanya kesempatan perempuan belum sejalan dengan sumber daya manusia yang ada. Untuk menggaet perempuan mengambil kendali lebih sering, bergantung pada kemauan tiap insan.

Tak terlepas dari keraguan terhadap perempuan, utamanya saat ia melanglang sampai pada posisi saat ini, Afra tak banyak mengikutsertakan penilaian orang lain untuk jadi penentu kariernya.

"Jadi, silakan orang menilai dengan cara pandang mereka, tetapi kita harus punya sesuatu, katakanlah yang orang lain tidak punya, tapi kita bisa berbuat baik bagi orang banyak," tandasnya.

Kepemimpinan Perempuan di Organisasi Mahasiswa

Posisi kepemimpinan perempuan di kampus tampaknya dapat dipantau pula lewat organisasi mahasiswa, seperti jajaran BEM dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Meski skeptisisme berdampingan dengan ambisi perempuan, itu tak lantas menggugurkan niat dalam pengembangan organisasi.

Santi
Wakil Presiden BEM FISIP

Santi, salah satunya. ia berhasil menjabat sebagai Wakil Presiden BEM FISIP periode 2019-2020. Dirinya mengaku banyak tantangan dan komentar dari luar tepatnya awal mula mengemban amanah. Ia harus menghadapi sosok yang mungkin saja belum memiliki perspektif kesetaraan. Bagi Santi, komentar yang santer ia dapati bagai multitafsir. Ada di antara menguji atau melecehkan secara tidak langsung, sebab langgengnya anggapan perempuan tak mampu memimpin.

Sereda Yunda Agisty
Ketua UKM Tarung Derajat 2022

Namun, dengan lingkungan kampus yang terbuka, ia mengungkap rasa syukurnya. Santi menilai FISIP tak begitu mempermasalahkan perempuan sebagai pemimpin, bahkan hal ini direpresentasikan dengan baik pada Himpunan Mahasiswa (Hima) maupun UKM yang didominasi perempuan.

"Kita harus mampu membuktikan bahwa perempuan ini memiliki peran yang penting dalam organisasi, kita tidak menganggap bahwa laki-laki itu adalah musuh, tapi kita menciptakan bahwa perempuan itu memiliki tempat yang setara, kemudian perempuan memiliki tempat menyampaikan pendapatnya, perempuan mampu untuk mengeluarkan aspirasinya, kemudian dia mampu untuk memimpin dalam suatu organisasi," ungkapnya Kamis (21/3).

Begitu pula dengan Sereda Yunda Agisty. Sebagai Ketua UKM Tarung Derajat Unmul, dirinya berada pada lingkungan yang suportif. Meski organisasi yang dinakhodainya dinilai maskulin, Sereda tak menerima perlakuan berbeda sebagai perempuan. Ia percaya diri karena memiliki segenap kemampuan di bidang yang ditekuninya.

"Kalau saya pribadi karena di bidang (tarung derajat) saya punya kemampuan dan termasuk salah satu pemegang sabuk tertinggi di UKM, ya jadi saya punya keinginan untuk enggak mau kalah dari yang lain. Saya mulai ikut tarung derajat dari kelas 6 SD, masa kalah sih sama yang baru baru join di bidang ini. Jadi, ya, saya percaya diri aja karena saya punya soft skill dan kemampuan dalam bidang itu," kisahnya kepada Sketsa pada Jumat (8/4).

Tim Liputan: Nindiani Kharimah, Novia Rahmawati, Andi Rizky Amalia, Enggal Triya, Hasanah, Julia Oriana, Nanda Billah, Rhaudatul Fitri
Editor: Khoirun Nisa

SRI MURLIANTI: PERGERAKAN DALAM KEMANUSIAAN, MENYELISIK WACANA TERSELUBUNG

Pendidikan tinggi sejatinya dapat menjadi pabrik pengetahuan, menyingkap isu-isu tak kasat mata untuk ditelaah lebih lanjut. Sketsa menyelisik bagaimana obrolan gender di Unmul berlangsung dalam kacamata Sri Murlianti, seorang dosen Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Selain sebagai dosen, Ia juga aktif dalam upaya edukasi maupun aksi dalam isu perempuan. Simak Wawancara Khusus (Wansus) Sketsa kali ini.

Apa keresahan soal kapasitas perempuan di Unmul? Sehingga menjadikan Anda terlibat dalam upaya-upaya penyadaran dan edukasi bagi perempuan?

Pertama, saya merupakan seorang intelektual, yang berarti adil dari dalam pikiran. Konteks yang tengah dibicarakan adalah universitas, bukan lembaga agama, bukan aliran massa tertentu. Kalau yang namanya universitas, itu kan universe, yang menjadi kesepakatan kita adalah hak intelektualitasnya. Jadi dari situ saya melihat, terutama di Unmul belum berjalan dengan baik. Artinya, ketika seseorang berbicara, masih dilihat siapa yang bersuara, laki-laki atau perempuan, kemudian dia berkelompok dengan siapa, seorang pejabat atau bukan, bergelar atau tidak.

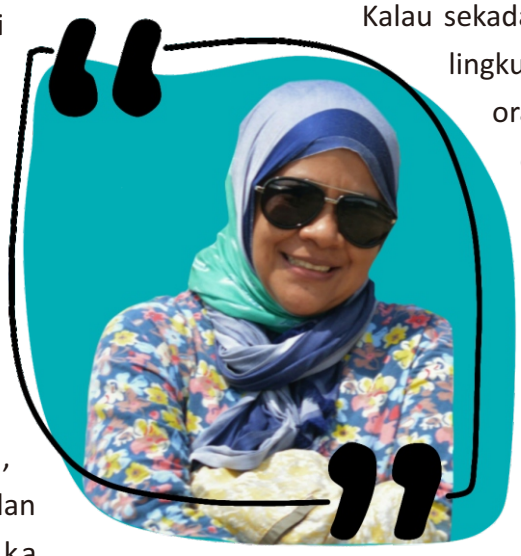

Sri Murlianti
Dosen Pembangunan Sosial,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Artinya apa? sebenarnya kebebasan intelektual berupa: siapa yang paling menguasai pengetahuan, maka dia yang paling berhak didengarkan untuk mengatakan kebenaran. Namun, itu belum berjalan dengan baik di Unmul. Meski ini menjadi persoalan biasa, tentunya di universitas manapun hal seperti ini masih tetap menjadi masalah. Hanya saja mungkin derajatnya dan konteksnya yang berbeda-beda.

Bagi Anda, apakah persoalan gender masih mempengaruhi dominasi dalam cara menyampaikan pendapat atau bersuara, khususnya di Unmul?

Pengaruh gender terhadap ruang berpendapat itu tergantung apa yang disuarakan. Kalau sekadar berbicara (terkait hal normatif), di lingkup universitas sendiri saya kira semua orang bisa. Akan tetapi, ketika berbicara dengan suara yang kritis, itu menjadi persoalan lain, dan gender memiliki pengaruh di dalamnya. Perempuan masih sangat terbatas, walaupun laki-laki juga menurut saya masih sangat kurang. Namun, tetap kalau menghitung jumlahnya personal, orang-orang yang kritis tetap masih banyak laki-laki.

Saya intelektual, saya harus adil dari sejak dalam pikiran, saya harus menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan. Akan tetapi tidak semua orang bisa seperti itu, tidak semua orang siap menanggung

terkadang dianggap sombong, tidak mau berbaur. Beragam personal attack rentan dilontarkan.

Nah, dari situlah kemudian terlihat, ternyata bukan berarti mereka menyetujui hal-hal yang kurang sesuai (untuk dikritisi), tetapi mengambil risiko itulah tidak semua orang berani dan mau

Kegiatan apa yang biasa Anda lakukan guna memperjuangkan hak perempuan di Unmul?

Di Unmul saya tidak pernah mendeklarasikan saya pejuang perempuan. Saya hanya berprinsip ketika saya keluar dari rumah, saya sudah tidak pernah mempermasalahkan jenis kelamin. Karena hal-hal yang berkaitan dengan jenis kelamin itu, biasanya yang berkaitan dengan hal domestik. Saya menjadi ibu, saya menjadi istri, kalau saya di dunia kerja, saya menjadi dosen, saya kumpul dengan teman-teman aktivis. Saya tidak pernah melihat saya perempuan atau laki-laki, jadi apa yang harus kita lakukan, just do it.

Sebab setiap dari kita tentu memiliki hati nurani, ketika dikaitkan ilmu pengetahuan, otomatis ketika tubuh berhadapan dengan manusia atau objek apapun pasti melahirkan respons, kamu harus ke sana-kamu harus ke sana. Bagi saya tidak ada rumus, apapun yang menggerakan tubuh dan hati saya, ini lakukan, ya saya lakukan. Saya tidak pernah mendeklarasikan saya membela perempuan atau membela laki-laki. Tetapi mungkin, walaupun masih jauh dari apa yang saya impikan, pergerakan saya itu adalah kemanusiaan. Menjadi manusia yang lebih baik, memanusiakan manusia apapun itu termasuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang dikritik banyak orang.

Dari kegiatan yang Anda upayakan, bagaimana antusias civitas academica di Unmul dalam membahas persoalan gender ini?

Gender tidak hanya berpusat pada satu tema. Tema domestik publik misalnya, akan membahas mengenai perempuan harus keluar rumah, harus mendapat pendidikan yang sama, harus mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Itu saya lihat antusiasmenya sudah oke, sudah tidak ada masalah di situ.

Tetapi kalau untuk hal yang lebih terselubung, lebih personal, dalam tanda kutip sebenarnya termasuk represi, seperti kekerasan seksual, perudungan terhadap perempuan, kemudian body shaming, itu mungkin tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama..

Misalnya persoalan represi penampilan kecantikan, terkadang perempuan dijajah tanpa disadari. Perempuan kebanyakan, tercermin pada penelitian tahun 2013, dengan kisah perempuan pekerja yang rela menghabiskan tiga puluh sampai empat puluh persen untuk kosmetik, belum termasuk kebutuhan fesyen lain seperti sepatu, bajunya, hingga tas. Artinya sekian persen penghasilannya itu sebenarnya untuk performa.

Pada konteks itu, tidak semua orang buka suara. Pola pikir saya harus putih, saya harus langsing, saya merasa bangga ketika saya pakai kosmetik yang labelnya ini, mereknya ini, karena ini merek menengah ke atas bukan mereknya orang miskin dengan harganya sepuluh ribu dua belas ribu, itu termasuk dalam inlanderitas sebenarnya, masalah mental inlander terhadap objektifikasi tubuh perempuan, itu yang masih belum banyak dibuka.

Kita masih sibuk berwacana persoalan gender yang masih domestik publik: perempuan di ranah publik, perempuan di DPR, perempuan di kepemimpinan publik, perempuan di birokrat. Akan tetapi persoalan yang lebih personal, otoritas tubuh perempuan, kecantikan, penampilan, represi

Ilustrasi: Freepik

komodifikasi terhadap tubuh, itu yang belum dibuka.

Ilustrasi: Freepik

Menurut Anda, apa langkah yang perlu lebih diupayakan Unmul dalam menghadirkan perspektif gender ini?

Universitas itu sebenarnya kan pabrik pengetahuan. Jadi memang harus membuka wacana-wacana undercover, dalam artian yang selama ini mungkin belum banyak dibuka, karena Unmul sebenarnya punya kajian perempuan dan kajian gender, tetapi saya tidak tahu isinya apa. Mungkin itu perlu dipertanyakan kembali selama ini apa yang dikerjakan baik pada level wacana ataupun dalam level riset dan advokasi.

Kami mendengar Anda kerap kali mengikuti aksi dan diskusi, apakah kegiatan tersebut Anda lakukan secara pribadi atau bersama komunitas?

Banyak. Kalau akademisi itu dari teman-teman hukum, kalau organisasi dari Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK), ada juga beberapa organisasi Kalimantan Timur. Ada Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Nurani Perempuan, kemudian yang lingkup nasional itu ada Perempuan Mahardika. Kalau perempuan tapi tidak berafiliasi pada organisasi perempuan, ada (sosok) Yohana Tiko dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hingga dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Apakah komunitas yang Anda sebut (LSM Nurani Perempuan) merupakan bagian dari upaya pendidikan perempuan yang dapat diikuti oleh civitas academica di Unmul?

Saya bukan dari Nurani Perempuan, hanya saja saya pernah kenal Nurani Perempuan ketika mereka mendampingi masyarakat adat di Long Bentuk, budaya Modang. Waktu itu tengah berjuang mendapatkan tanah adat bahkan sampai sekarang pun masih bergulir juga, salah satu penggerak utamanya di sana yang mengakomodasi itu ya Nurani Perempuan.

Kalau saya ketika 2013 sampai 2017 tergabung di Borneo Institute For Community Empowerment, sebagai direktur. Lanjut pada 2017 tergabung di Japsika (singkatan dari Jaringan Pembangunan Kalimantan) sampai sekarang, juga di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

Ilustrasi: Freepik

Anda merupakan salah satu penulis "Perempuan dan Dinamikanya". Impact apa yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca?

Melalui buku itu, saya menulis kritik budaya perawatan kecantikan. Fenomena itu sebenarnya

memang concern saya yang cukup lama, sebelum saya masuk ke isu-isu ekologi dan masyarakat seputar perkebunan. Saya memang concern pada kajian postfeminisme, khusus kritik ke perempuan kelas menengah, terutama budaya hedonisme.

Mengenai budaya perawatan kecantikan, ketika terjadi pada perempuan kelas menengah ke bawah dalam arti dia tidak literat (memahami lebih lanjut), itu tidak menjadi masalah ketika berhadapan dengan produk kecantikan. Seperti oh ini ada lisensi dokter loh, ada BPOM loh, produk itu kemudian dianggap aman, itu masih bisa dimaklumi.

Sementara pada kelas menengah ke atas, diandaikan berpendidikannya tinggi, dengan pekerjaannya yang memakai kecerdasan, sehingga seharusnya pengambilan keputusan lebih berhati-hati. Utamanya ketika berhubungan dengan zat kimia untuk kulit pada sebuah produk. Sebab dampaknya meluas, bisa berpengaruh pada kesehatan, sehingga sejumlah pertimbangan perlu dilakukan. Seperti mencari pengetahuan terkait suatu produk, bagaimana dampak dan reaksinya terhadap tubuh, bukan malah secara penampilan bisa glowing apa tidak.

lebih lanjut ketidakpekaan perempuan kelas menengah ke atas itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ketika ada stempel dokter, ketika ada stempel BPOM, kemudian dipercaya begitu saja. Padahal seringkali itu dijadikan semacam alibi.

Misalnya penelitian S-3 saya itu, aturan hidrokuinon batasnya 2,5 kadarnya dalam pemutih. Nah, klinik-klinik kecantikan itu pakainya bisa (dalam rentang) 2,99 atau 2,98. Bayangkan selisih digitnya, itu pertama wacana kedokteran. Sehingga yang dibeli oleh pasar telah terkomodifikasi, yang pertama dicurangi digitnya, kedua disembunyikan, artinya pengetahuan tidak dibuka semua terutama terkait keamanan produk.

Seperti produk ini aman karena batas BPOM 3,0 atau 2,49 kan batasnya 2,5 tetapi di situ tidak dijelaskan bagaimana ketika suatu produk dipakai seumur hidup, setiap hari. Kemudian masuk ke kulit kita, apa dampaknya? Di jurnal-jurnal internasional sudah sangat gamblang bahwa hidrokuinon ketika dipakai secara berkelanjutan, akan menyebabkan kanker kulit misalnya atau iritasi-itasi.

Sebenarnya ada pengetahuan media yang kita bisa akses dengan gratis, namun kebanyakan budaya kita tidak melakukan itu. Sikap percaya terhadap bujukan rumus pasar yang menjadi kritik saya. Kemudian pengakuan sosial, sebagai contoh dosen lulusan doktor, tidak mungkin dong saya perawatannya hanya di salon pinggir jalan gitu. Padahal realitanya doktor itu gajinya hanya berapa, namun orang mengira dan kita senang dikira kalau doktor itu gajinya besar. Maka saya memaksa, misalnya sekali masuk (salon) habis tiga juta padahal gajinya barangkali hanya tujuh juta.

Hal seperti itu menunjukkan bagaimana budaya kecantikan sebenarnya bukan sesuatu yang baru, namun tradisi dari zaman dulu ada. Tetapi oleh para pemilik modal kemudian dimodifikasikan, menjadikan kita sebagai objek jualan dan kita semua menjadi korban. Utamanya untuk klinik kecantikan, tragisnya konsumennya itu perempuan menengah atas, berpendidikan tinggi, profesor doktor banyak, kira-kira seperti itu yang saya ungkap melalui buku.

Tim Liputan: Firza Amalia Putri, Masriani, Muhammad Adil Alparizi

Editor: Khoirun Nisa, Restu Almalita

Tak Mesti Dilema Ingin Cantik atau Pintar

Paras rupawan atau beauty privilege bukan cuma omong kosong. Mereka yang memiliki tampang rupawan ini, dinilai lebih kompeten dan sukses di dunia kerja. Markus & Rosenblat (2006) menyebut kecantikan dinilai berbanding lurus dengan kecerdasan, keterampilan sosial, dan kesehatan.

Itu memang bukan faktor tunggal, namun mereka yang dapat berkah kecantikan ini punya akses lebih mudah dalam mencapai puncak karier, dibanding mereka yang tak memilikinya. Dalam Jurnal Wacana Standar Kecantikan Perempuan Indonesia, perempuan dijejali dengan berbagai citra kecantikan ideal. Citra inilah yang kemudian diinternalisasi, yang tanpa ampun mengukur ketidaksempurnaan tubuh perempuan dan fesyen tingkat tinggi.

Menurut Anthony Synnott dalam Tubuh Sosial: Simbolisme, Diri, dan Masyarakat (Jalasutra, 2007), tubuh tidak sepenuhnya otonom, ia dikonstruksi oleh sosial, budaya, pasar, dan ekonomi, sehingga menjadi tubuh yang bukan milik diri sendiri. Media massa maupun media baru, punya andil dalam membentuk apa yang menjadi selera hingga idealisme tersebut.

Maka tak heran, banyak perempuan yang berlomba-lomba menggapai konsep cantik sebagaimana yang diterima di masyarakat. Selain tuntutan tren menjadi cantik, dewasa ini wejangan seperti ‘kalau tak cantik, minimal cerdas’. Ini bak memberi dilema baru.

Kacamata Nor Anisa sebagai Perempuan

Minggu (3/4) lalu, Nor Anisa Salim, mahasiswi yang baru saja lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) program studi Hubungan Internasional ini, punya kerangka berpikirnya sendiri menelan itu semua. Ia banyak membahas upaya penghapusan stigma dari standar kecantikan yang kian menaikkan ekspektasi publik.

Menurut Anisa, cantik secara visual adalah hal yang relatif. Tiap insan memiliki personanya. Persona ini menyoal perkara value atau nilai yang ada pada diri manusia, terkhusus perempuan.

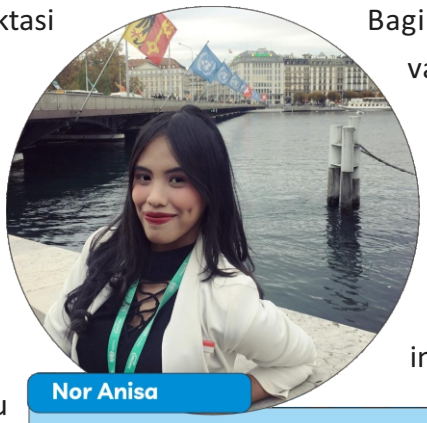

Nor Anisa
Alumni Hubungan Internasional Unmul

"Yang membedakan perempuan itu beda dari yang lain adalah kecerdasan secara emosional. Sekarang adalah bagaimana mental kita sehat, bisa menghasilkan uang, kreatif, berguna untuk orang lain, punya karya, punya wawasan yang luas," tuturnya pada Sketsa melalui Zoom Meeting.

Dalam penuturannya, urgensi perempuan bukan lagi terletak pada kompetisi siapa yang paling cantik lewat anggapan masyarakat Melainkan perkara sejauh apa perempuan mampu memberdayakan perempuan lainnya.

Keistimewaan paras itu tidak melulu terasosiasi dengan kata cantik. Jauh lebih penting dari itu, seorang perempuan juga dapat memilih jalan yang akan ditempuh melalui kecerdasan, untuk berdampak. "Kecantikan itu bukan menjadi syarat, karena yang dilihat dan dinilai bukan dari fisiknya, melainkan pemikirannya."

"Aku tidak cantik, tapi aku punya kesempatan dalam artian bagaimana aku bisa berdampak buat kampus, bisa berkontribusi buat kampus, dan bisa mengharumkan nama kampus," imbuh Anisa.

Baginya, tidak semua hal membutuhkan validasi dalam mencapai kesuksesan. Berparas cantik dan berotak cerdas, tentu akan memperkuat nilai yang ada di dalam diri. Namun, yang perlu diketahui perempuan memiliki otoritas terhadap tubuh dan kehidupannya. Hal ini yang membuat Anisa berpendapat tak perlu mengimitasi hidup orang lain. Menyamakan langkah orang lain yang berbeda masa memulainya dengan diri, adalah hal yang cuma-cuma.

"Keyakinan, kecerdasan, dan usaha kamu yang bisa membentuk diri sendiri. Jadi, bangunlah apapun yang bisa membuat kamu berkarya, maka kamu akan diingat oleh orang lain. Kalau kita bilang cantik, semua perempuan juga cantik, tapi belum tentu akan diingat," tutup Anisa.

Tim Liputan: Siti Rahmi dan Nurvidya Sistha Azzahra
Editor: Nindiani Kharimah

Langgeng Bias Versus Konstruksi Sosial di Indonesia

Pernah tidak, kamu terpikir kalau kurikulum pendidikan kita masih sering menampilkan peran gender normatif? Ini dapat tercermin seperti anak perempuan yang digambarkan sedang menyapu halaman dan membantu ibu menjaga adik, sementara anak laki-laki digambarkan sedang sibuk belajar bersama ayah.

Alih-alih menampilkan keberagaman profesi dan mendorong anak perempuan untuk meraih pendidikan tinggi, buku pelajaran lebih sering menampilkan karakteristik stereotip peran gender. Buku pelajaran masih sering memperlihatkan peran gender 'tradisional' ketika tugas domestik diasosiasikan dengan perempuan dan hal-hal teknis menjadi milik laki-laki.

Selain itu, sekolah juga tak jarang mengarahkan perempuan ke pekerjaan-pekerjaan stereotip seperti guru atau perawat. Konstruksi sosial mengenai pembagian peran gender yang tidak setara ini ternyata sudah diajarkan sejak tingkat pendidikan paling awal, yaitu Sekolah Dasar (SD). Dalam proses sosialisasi di kemudian hari, hampir seluruh aspek kehidupan sosial lebih banyak merefleksikan "kelaki-lakian" atau yang kemudian disebut dengan sistem "patriarki".

Konstruksi sosial dan budaya patriarki nyatanya masih menjadi akar dari permasalahan bias gender dalam pendidikan di Indonesia. Pengalaman masa sekolah ini akan berdampak pada kehidupan kita sebagai pekerja. Kamu sering tidak, melihat berbagai persyaratan pekerjaan yang tidak relevan dengan *skill* kerja yang dicari? Misalnya, perempuan harus *good looking* dengan rentang usia tertentu. Meski sekarang ini sudah banyak perusahaan yang melihat kandidat secara objektif, terlepas dari gendernya, masih banyak perusahaan yang bias dengan mencantumkan persyaratan yang seksis.

Pada 2021 lalu misalnya, sempat ramai kasus pelamar kerja yang ditanyai seputar masalah pribadi. Seperti masih perawan atau tidak, kenapa masih belum menikah, hingga permintaan untuk memakai pakaian tertentu.

Ilustrasi: Freepik

Dampak lain akibat konstruksi sosial dan budaya patriarki ini adalah pernikahan dini. Patriarki membentuk sistem yakni perempuan sebagai penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik. Implikasinya adalah kebebasan mereka benar-benar dibatasi dengan status seorang istri. Misalnya mereka tidak diberi kesempatan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau mengembangkan bakat serta kemampuan yang mereka miliki.

Budaya ini juga memberi stigma terhadap perceraian. Perceraian merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Budaya patriarki tak dimungkiri menyorot kesan negatif cenderung kepada janda daripada duda. Kata duda misalnya, sering disebut 'keren'. Sementara, janda biasanya diasosiasikan dengan kata 'gatal', 'seksi', atau bahkan 'penggoda'.

Monalisa
Mahasiswi Prodi Pembangunan Sosial
FISIP 2019

Dalam banyak kasus, stigma buruk terhadap janda juga menjadikan perempuan takut untuk berpisah dengan suaminya yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahkan ketika sudah bercerai pun, perempuan sering kali didorong untuk cepat-cepat menikah lagi dan jangan terlalu lama menjanda.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seharusnya mereka memiliki akses yang sama dalam hal memperoleh pekerjaan, pendidikan, mengambil keputusan, bergabung dalam politik, dan lain sebagainya. Namun, fenomena ketidaksetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat, yakni tentang peranan yang sudah dipelajari sejak awal memulai pendidikan di SD. Oleh karenanya, Indonesia perlu membenahi materi pembelajaran siswa dan menyusun materi yang sensitif gender, lalu mengintegrasikannya ke setiap mata pelajaran.

Substansi bias gender tidak akan berubah menjadi adil gender apabila negara secara struktural tidak sensitif terhadap gender dan masalah mengenai perempuan itu sendiri. Begitu pula dengan masyarakat yang masih melanggengkan konstruksi sosial yang tidak adil gender di masyarakatnya. Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil (ketidakadilan gender) bukan hanya sekadar perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat serta budaya patriarki yang mengakar sebagai akar penindasan perempuan.

Opini ditulis oleh Monalisa, ia merupakan mahasiswi di program studi Pembangunan Sosial, FISIP 2019.

Editor: Efrianti Muhnizar

Evi Susanti: Piawai dan Dedikasi dalam Bekerja

"Meskipun saya petugas kebersihan perempuan sendiri, saya tidak pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dari rekan kerja saya"

Perasaan aman itu diungkap Evi Susanti kepada awak Sketsa siang itu di tempatnya bekerja. Wanita yang lahir dan tumbuh besar di Samarinda ini, bekerja sebagai salah satu alih daya, yakni petugas kebersihan di Unmul Hub tepat 5 April 2021 lalu. Evi adalah satu-satunya petugas kebersihan perempuan yang bertugas di Unmul Hub. Sebelum menjadi petugas kebersihan, Evi pernah bekerja sebagai penjaga toko. Perempuan yang lahir pada 2 April 1983 ini berujar, dirinya piawai dalam mengetahui berbagai tingkah laku pelanggan. Segenap pengalamannya itu membawa ia jadi perempuan yang bekerja dengan telaten. Bagaimanapun, Evi ingin mencurahkan hasil terbaiknya dalam bekerja.

Berbeda dengan profesinya kini, Evi mengaku bersyukur, pasalnya menjadi petugas kebersihan tak menuntut dirinya kerap bertemu dengan atasan. Diakui Evi, tantangan itu ia dapat ketika terjadi kesalahan kecil dan berujung teguran atau kemarahan sang bos saat masih menjaga toko. Itu membuatnya tak leluasa bekerja.

Beralih pekerjaan setahun belakangan ini bagai angin segar. Perkara tak leluasa saat bekerja bukan lagi momok baginya. Menjadi petugas kebersihan bukannya tak melelahkan, namun kenyamanan mengerjakan tiap detail aktivitas ini dianggapnya sebagai bonus. Ia mengerjakannya sebagaimana melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Santai, leluasa, dan dedikasi adalah kata yang tepat untuk menggambarkan maksud Evi kala itu pada awak Sketsa.

"Pernah suatu hari menemukan uang dua puluh ribu dan langsung lapor ke staf jika merasa ada yang kehilangan uang dengan jumlah nominal tersebut. (Saya) mengerjakan pekerjaan dengan cepat jika sedang berlangsung kegiatan pada area gedung Unmul Hub," ungkapnya, Kamis (7/4).

Berada dalam lingkup kampus dinilai sebagai keuntungan tersendiri untuk perempuan yang bekerja di bidang tenaga alih daya ini. Kampus, dengan civitas academica yang dipercaya Evi adalah orang-orang berkarakter mulia membuatnya lega, sebab sampai hari ini dapat memberi ruang aman, juga tanpa intimidasi. Meski diakuinya, ia belum terikat dengan organisasi pekerja manapun, yang sewaktu-waktu dapat memberi perlindungan untuk dirinya apabila terjadi kendala.

Selama bekerja di Unmul Hub, Evi mengikuti dinamika agenda di dalamnya. Apabila civitas academica Unmul banyak berkegiatan di Unmul Hub, dirinya akan bekerja dengan cermat untuk memastikan tak mengganggu agenda tersebut. Dominasi laki-laki di tempat kerjanya ini, tak membuatnya berkecil hati. Bersama rekan kerjanya, ia berupaya saling menghargai dan tak meremehkan satu dengan yang lain.

Walaupun terhalang dengan jarak tempat tinggal yang jauh, tak menyurutkan semangat dalam bekerja. Untuknya, masih diberi kesempatan bekerja di masa pandemi, ketika banyak pemutusan hubungan kerja adalah hal yang disyukuri. Sebab ia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menopang orang tuanya dengan pekerjaan saat ini.

Prioritas utamanya tetap bekerja dengan tekun, meski menemui anggapan sebelah mata. “Menurut saya kondisi ini miris. Saya akan bekerja apapun selagi pekerjaan yang saya lakukan ini halal dan berkah. Pembagian gaji (pekerja perempuan dan laki-laki) juga sama rata, sesuai dengan profesi masing-masing.

Tim Liputan: Sari Dewi Handayani, Zaynab Army Sijaya, Agnes Grachia Saragih
Editor: Restu Almalita

Kian Lantang Eksistensi untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Di tengah gempuran penemuan serta inovasi terbaru dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Unmul menjadi salah satu perguruan tinggi yang terlibat dalam dinamika itu. Dalam pencapaian yang diraih itu, terdapat kiprah perempuan hebat yang menorehkan beragam prestasi.

Kali ini, cerita datang dari dua orang perempuan yang mengemban peran penting dalam penelitian berbasis tropical studies, serta pemanfaatan media sosial sebagai upaya memperkuat akses edukasi dan informasi.

Adalah Swandari Paramita, dosen Fakultas Kesehatan (FK) Unmul yang diwawancarai pada Selasa (29/3) lalu. Di tengah kesibukannya, perempuan berkacamata ini menyambut kedatangan awak Sketsa dengan hangat dan bersedia membagikan pengalamannya dalam dunia penelitian.

Swandari Paramita
Dosen Fakultas Kedokteran

Ia merupakan satu dari sekian banyak civitas academica Unmul yang produktif dalam meneliti. Fokus penelitiannya pun tak jauh dari kekayaan alam

yang ada di Kaltim, seperti obat-obatan yang terbuat dari bahan herbal dan memiliki berbagai manfaat bagi banyak orang.

Dirinya menuturkan keanekaragaman tanaman herbal di Kalimantan mempunyai ciri khas. Namun, ia menyayangkan bahwa potensi tersebut belum digali sepenuhnya. Hingga pada 2012 hingga 2015 lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan survei riset tanaman obat dan jamu di seluruh Indonesia, termasuk Kaltim.

"Nah, beberapa etnis Dayak yang diwawancarai oleh tim Kemenkes pada sepuluh tahun yang lalu itu menemukan bahwa ada sebuah rimpang jahe yang namanya bangle. Bisa kita bilang dengan jahe dayak. Jadi etnis Dayak di Kalimantan Timur menggunakan bangle sebagai obat untuk menurunkan kolesterol".

Berangkat dari hal itu, memicunya untuk membuktikan kebenaran khasiat bangle. Sehingga dimulailah perjalanan Swandari dalam memimpin sebuah penelitian yang berjudul "Invensi Minuman Herbal untuk Kolesterol Tinggi Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Timur".

Telah berlangsung sejak 2018, Swandari mengungkap penelitiannya yang masuk ke dalam daftar sepuluh kontrak penelitian nasional pada 2021 ini merupakan kolaborasi dengan rekannya, Enos Tangke Arung, yakni seorang dosen Fakultas Kehutanan (Fahutan) Unmul.

"Bangle sebenarnya sudah jadi risetnya teman saya, profesor Enos Tangke Arung sejak tahun 2009. Dia sudah mengerjakan bangle untuk pemutih kulit, herbal asam urat, dan sebagainya. Jadi, kita (tim penelitian) mengembangkan pada hal lain saja. Kita (tim penelitian dan Enos) berkolaborasi", paparnya.

Sebagai seorang dokter, Swandari memberikan bangle ke pasien sebagai jamu seduhan biasa. Adapun bangle tersebut dijadikan sebagai minuman fungsional seperti wedang jahe. Dengan begitu masyarakat awam dapat menerima dengan lebih mudah.

"Kita suruh mereka (pasien) minum setiap hari selama tiga puluh hari, dan ketika kita ambil darahnya, memang terlihat ada penurunan kolesterol. Ya, lumayan, begitu."

Besar harapan Swandari agar tanaman obat khas Kaltim dapat digunakan secara nasional, termasuk bangle. Namun, produk tersebut belum kembangkan lebih lanjut.

"Kita masih belum punya produk jadinya gitu, harapan saya tahun ini ada sebuah produk. Jadi orang kalau mau beli di mini market atau di toko obat sudah ada," tutupnya.

Aulia Suhesty dan Perjalanan Prima Solutions

Beralih ke Aulia Suhesty, dosen psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul ini secara konsisten memberi sumbangsihnya kepada khalayak melalui media sosial. Berbekal keinginan berbagi ilmu pengetahuan yang dimilikinya, Aulia kemudian mewujudkan sebuah akun edukasi seputar Psikologi dengan nama pengguna @prima_solutions di Instagram.

Untuk menyelami perjalanannya selama

mengelola akun tersebut, Sketsa berbincang-bincang dengan Aulia pada Minggu (27/3). Di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang dosen, psikolog, sekaligus kreator konten, Aulia menyempatkan diri untuk menyapa awak Sketsa melalui sambungan telepon WhatsApp.

Ia menuturkan bahwa Maret 2021 lalu menjadi awal baginya untuk mengelola akun @prima_solutions secara aktif. Wajah akun itu akan menampilkan tulisan Membahas Tema-Tema Psikologi, Pengembangan diri, dan Motivasi. Akun tersebut mengangkat berbagai topik sebagaimana yang telah disebut dan sebagian besar disajikan dalam bentuk video.

Tak sekonyong-konyong menjadi creator konten, ia mengungkap bahwa kursus untuk memiliki bekal membuat konten dan membangun jenama diri ia ikuti.

"Saya mengikuti langkah-langkah di dalam materi kursus yang diberikan. Mulai dari cara memilih target pasar dan berapa usianya, cara membuat caption agar orang yang membacanya menjadi tertarik, cara membuat reels yang jangkauannya luas, dan lain-lain."

Usaha yang dilakukannya pun membuahkan hasil. Kini, akun Instagram yang dibuatnya telah diikuti oleh sekitar 35 ribu pengikut. Tak sampai di situ, akun itu kerap dihujani pesan langsung dari audiens menyangkut permasalahan yang sedang dialami. "Artinya, kan, dia (pengguna Instagram) percaya dengan Prima Solutions."

Selain memproduksi konten, akun tersebut mengadakan siaran langsung di Instagram dalam kurun dua minggu sekali secara berkala, Jumat dan Sabtu di malam hari. Narasumber yang dihadirkan berangkat dari beragam profesi, seperti dokter. Itu semata-mata ia tujukan agar pengikut akun mendapat ilmu dan keterampilan baru.

Niatnya itu juga tercurahkan melalui pelayanan konseling serta psikotes yang ia buka, baik daring dan luring. Dalam penuturannya, ia mengaku pelayanan tersebut dilakukan gratis maupun berbayar.

Tak selamanya berjalan mulus, ada kalanya perjalanan Aulia dihampiri oleh beragam tantangan. Terkadang, dirinya kehabisan ide dalam menyuguhkn konten. Kendati ia mengatasinya dengan memperbanyak membaca buku dan menonton konten-konten di platform lain seperti YouTube agar mendapat inspirasi.

Melalui kehadiran akun @prima_solutions di tengah masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi, Aulia berharap akun ini senantiasa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan mental dengan cara yang menyenangkan.

"Harapannya bisa berkontribusi untuk hal-hal yang positif, dan bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat terkait tema-tema kesehatan mental psikologis. Agar masyarakat mempunyai kesadaran terhadap kesehatan mental masing-masing," kuncinya.

Tim Liputan: Efrianti Muhnizar Sari, Rhiska Afriliani, Alya Hanifah Irwadi

Editor: Novia Rahmawati, Restu Almalita

12-01*

Sudah mati, berlari membawa koreng yang masih basah

Bercucuran darah, kuatnya tak sedikit pun goyah

Gentar perjuangan, soal menjaga keamanan negara.

Menjaga dari mana kau dilahirkan saja, jauh dari kata paham

Sana sini sibuk pamer jabatan, banggakan orang tua

oo tidak kata tuhan, besok takdirmu dihinakan

Murka, dikutuk satu negara

Besok, tulisan mana lagi yang akan dirobek, di sembunyikan, sehingga kalianlah yang pantas digelari tuli, bisu, dan buta oleh pemimpin kita? bukan disabilitas.

Mati negeri ini, mati

Kosong tak berisi

Kita, ada tapi rapuh.

San diingat I

berlari
aku masih berdiri
mendamba yang lain
aku masih berbaing
tapi setiap hari
bukan yang lain
hanya aku yang keliru
atau kau butuh tempat baru
aku tidak
jangan aku
aku baru tapi tidak untuk bernaung

**Puisi bercerita soal konflik yang terjadi pada Desember dan Januari di 2021-2022 dari kasus Bripda Randy Bagus yang menjadikan Novia kekasihnya untuk menjadi korban menggugurkan kandungan hingga meninggal dunia,kasus mantan walikota yg sekarang menjadi menteri ibu Risma yang memaksa anak difabel tuli untuk berbicara juga bupati langkat dengan kontroversinya.*

Puisi ditulis oleh Radhika Darmawan, mahasiswi program studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu dan Budaya 2019.

Mengapa Tidak Jadi Ketua?

Ilustrasi: Freepik

Reina, sahabatku yang paling mati-matian mengejar karier sampai hari ini. Sudah lima tahun lamanya aku berteman dengan perempuan yang punya segudang keberanian bahkan bisa terbilang nekat ini. Sejak dari zaman kuliah, dia memang perempuan yang tidak kenal lelah dan pantang menyerah.

Dia yang paling anti mengeluh dengan segala kacau balaunya tugas, belum lagi pekerjaan organisasi yang juga ikut campur dalam padatnya kehidupan anak kuliah saat itu. Reina dengan sepenuh hati menjalankannya, berbeda dengan aku seorang teman lelaki yang punya mental tidak sekuat Reina yang baru mengerjakan separuh paragraf di Microsoft word sudah mengeluh bak mengerjakan satu buku novel.

Hari ini adalah hari pemilihan kepala divisi di kantor tempat Reina bekerja. Karena ia adalah orang yang begitu berambisi, ia pun turut serta mengajukan diri sebagai kandidat calon kepala di divisi tersebut. Aku pun mendukung penuh pilihannya, bagaimana tidak, kualifikasi yang dimilikinya sudah tidak diragukan kinerjanya apalagi sudah pasti selalu maksimal.

"Selamat morning, Adit yang paling ganteng se-Jakarta. Mau berangkat kerja juga nih?", sapa Reina yang berpapasan denganku di komplek tempat di mana kita tinggal berdekatan.

"Benar sekali Bu Reina, wih kemeja lo rapi amat, hari ini banget pemilihan kepala divisinya?," balasku dengan nada sedikit mengejek.

"Iya nih, Dit, gue deg-degan, doain semoga hasilnya berpihak ke gue ya."

Meski Reina adalah perempuan yang selalu terlihat kuat dan sanggup menghadapi segala pekerjaan, namun ia tetap manusia biasa yang terkadang juga punya rasa ragu dan tidak percaya diri.

"Pasti gue doain dong, semangat ya!"

Kami lantas pergi ke kantor masing-masing dan siap menyantap tumpukan pekerjaan yang sudah menanti.

Aku bekerja sebagai manajer di sebuah toko kosmetik yang ada di pusat perbelanjaan di Jakarta, yang notabene kebanyakan pegawainya merupakan perempuan. Para pegawai perempuan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan punya tekad kuat dalam bekerja. Ada yang sambil kuliah bahkan sudah berkeluarga. Terkadang aku takjub dengan mereka yang bagaimana caranya bisa

mengatur waktu antara bekerja dengan rumah tangga, hebat kataku.

Saat sudah jam pulang, aku pun bergegas meninggalkan kantor yang penuh dengan perempuan-perempuan hebat itu. Ingar bingar kota Jakarta mengiringi kepulangan yang cukup melelahkan malam ini, kemudian disambut dengan semrawut wajah Reina yang tidak begitu nyaman dilihat.

"Kusut tuh muka, belum disetrika apa gimana?"

"Diam deh Dit, lagi enggak mood nih gue."

Terlihat jelas dari raut wajah Reina, ia sepertinya sedang punya masalah, kemungkinan besar masalah pekerjaan. Reina adalah perempuan yang tahan banting, tapi untuk masalah pekerjaan, ia yang paling mudah mengekspresikannya.

"Ngopi dulu mau enggak?"

Kuajak Reina mengunjungi coffee shop yang ada di sekitar komplek. Sebagai teman yang baik, menjadi pendengar keluh kesah Reina adalah tugasku, lalu saran serta masukan adalah bonusnya.

"Salah memang ya, mencalonkan diri jadi ketua divisi?" ucap Reina membuka obrolan kami dengan nada kesal.

"Kenapa memangnya? Anak-anak julidin lo lagi ya di kantor?"

Selama pencalonan kepala divisi ini, Reina selalu mendapatkan ejekan secara terang-terangan dari rekan kantornya. Mereka menilai seorang perempuan lebih baik tidak mengambil posisi pemimpin, sebab "katanya" mental seorang perempuan sangat tidak cocok dengan posisi tersebut. Ya cengenglah, sensitif, cerewet dan penilaian lainnya.

"Bos lo juga ngomong kayak begitu?"

"Enggak sih, justru beliau bangga ada perempuan yang berani mengajukan diri."

"Lho, bagus dong kalau begitu, selagi lo yakin bisa bertanggung jawab dan menjalankan tugas kalau lo terpilih, ya omongan mereka itu anggap angin ribut aja, Rei."

"Lo sebagai laki-laki juga pernah mikir begitu enggak sih, Dit?"

"Dulu pernah, tapi pas ketemu lo, udah enggak lagi. Menurut gue perempuan ternyata bisa kok jadi seorang pemimpin."

Benar, aku dulu orang yang tidak percaya seorang perempuan bisa melakukan pekerjaan yang biasanya hanya diisi oleh seorang laki-laki, pemimpin contohnya. Namun ketika melihat Reina yang sempat jadi ketua BEM saat masih kuliah dulu, ia punya spesifikasi pemimpin yang baik. Jadi setelah kupikir, kenapa tidak seorang perempuan bisa menjadi kepala di tempatnya bekerja?

"Hasilnya gimana? Sudah diumumkan?"

"Besok, kalau enggak *kepilih* juga enggak apa-apa *deh*."

"Yakin aja dulu Rei, kalau *gue mah* sudah menebak pasti *lo* yang *kepilih*."

"Haha semoga ya, Dit, nanti *gue* traktir *deh* kalau ternyata yang *lo* bilang benar."

Setelah selesai menikmati kopi dan membahas soal pemilihan ketua divisi Reina, kami berdua kembali ke rumah masing-masing dengan pakaian kantor yang sudah kusut kumal. Aku tidak sabar dengan hasil dari penilaian Bos Reina yang akan memutuskan siapa yang layak menjadi ketua divisi, begitu pun dengan Reina, kami berdua sama-sama menunggu hari esok.

Malam tadi berganti menjadi siang yang begitu terik hari ini. Aku sedang menunggu Reina yang tadi mengajakku makan siang. Reina tipikal orang yang akan mengajakku keluar jika ia sedang banyak pikiran. Kupikir, dia sedang punya masalah makanya mengajakku makan siang bersama. Mungkin alasannya mengajakku karena ia tidak terpilih menjadi ketua divisi di kantornya.

Setelah Reina tiba, kami pun langsung memesan makanan di restoran pilihan Reina. Ia memesan makanan yang biasanya ia makan ketika punya banyak masalah. Aku semakin yakin dengan situasi ini, Reina sedang kalut.

"Rei mau pesan es krim juga, *enggak*? *Gue* yang bayar."

"Tumben banget?"

Es krim adalah penawaranku sebagai tanda untuk menghibur hati Reina. Aku berharap es krim itu mungkin akan menghiburnya, walaupun sebenarnya ia tidak memasang wajah masam saat itu, aku hanya menebak-nebak suasana hatinya.

"*Lo enggak* mau tahu soal pemilihan ketua divisi *gue*, Dit?"

"*Ya* kalau *lo* bersedia menceritakan, *gue* siap mendengarkan."

Ah sial, padahal tadinya aku tidak mau membahas soal itu, namun karena Reina yang memulai aku hanya siap pasang kuping dan memikirkan reaksi apa yang harus kuberikan.

"*Gue* yang terpilih Dit! Gue kira enggak akan bisa!"

Ternyata tebakanku barusan salah besar, padahal aku sudah menawarkan es krim dengan tiba-tiba kepada Reina. Namun aku turut senang mendengarnya. Tidak heran jika Reina terpilih, ia memang pantas mendapatkan posisi tersebut. Aku pun penasaran dengan reaksi para rekan kerja Reina yang meremehkannya kemarin.

Terlepas dari tekad, kepercayaan diri, dan kinerja Reina yang sudah tidak diragukan, dibalik posisi terpilihnya Reina hari ini ada pemikiran Bos Reina yang bisa dibilang menjadi jalan pembuka bagi Reina mengejar mimpi dan tujuannya. Tidak menganggap remeh seorang perempuan dan justru mendukung niat Reina, adalah hal yang patut diacungi jempol.

"Selamat, Reina! Jangan lupa janji traktir tadi malam."

"Terima kasih Dit. Tenang semua makanan ini aku yang bayar, *hehe*."

Penulis: Siti Nurmasyitah
Ilustrasi: Virdha Andini Maharani
Editor: Sari Dewi Handayani

Ilustrasi: Freepik

Pengalaman Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Mahasiswa Unmul

Selain pemberitaan kekerasan seksual yang marak di media mainstream dan media sosial, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Indonesia pada 2021 mencatat peningkatan kekerasan berbasis gender siber. Komnas Perempuan melaporkan terdapat 510 kasus kekerasan berbasis gender siber pada 2020. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 216% dari jumlah kasus pada 2019, yaitu 216 kasus.

Tidak hanya didorong oleh canggihnya teknologi komunikasi, peningkatan ini turut dipengaruhi oleh peralihan aktivitas sehari-hari masyarakat selama pandemi Covid-19. Manifestasi KBGS ini seperti pelecehan siber, distribusi foto atau video pribadi, pemalsuan identitas, peretasan, dan ujaran kebencian.

Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LPM Sketsa Unmul melakukan survei mengenai tanggapan dan pengalaman civitas academica Unmul terkait KBGS. Terdapat 102 responden yang terdiri dari 74 responden perempuan dan 28 responden laki-laki.

INFOGRAFIS

1 Apakah anda tahu/ pernah mendengar istilah KBGS sebelumnya?

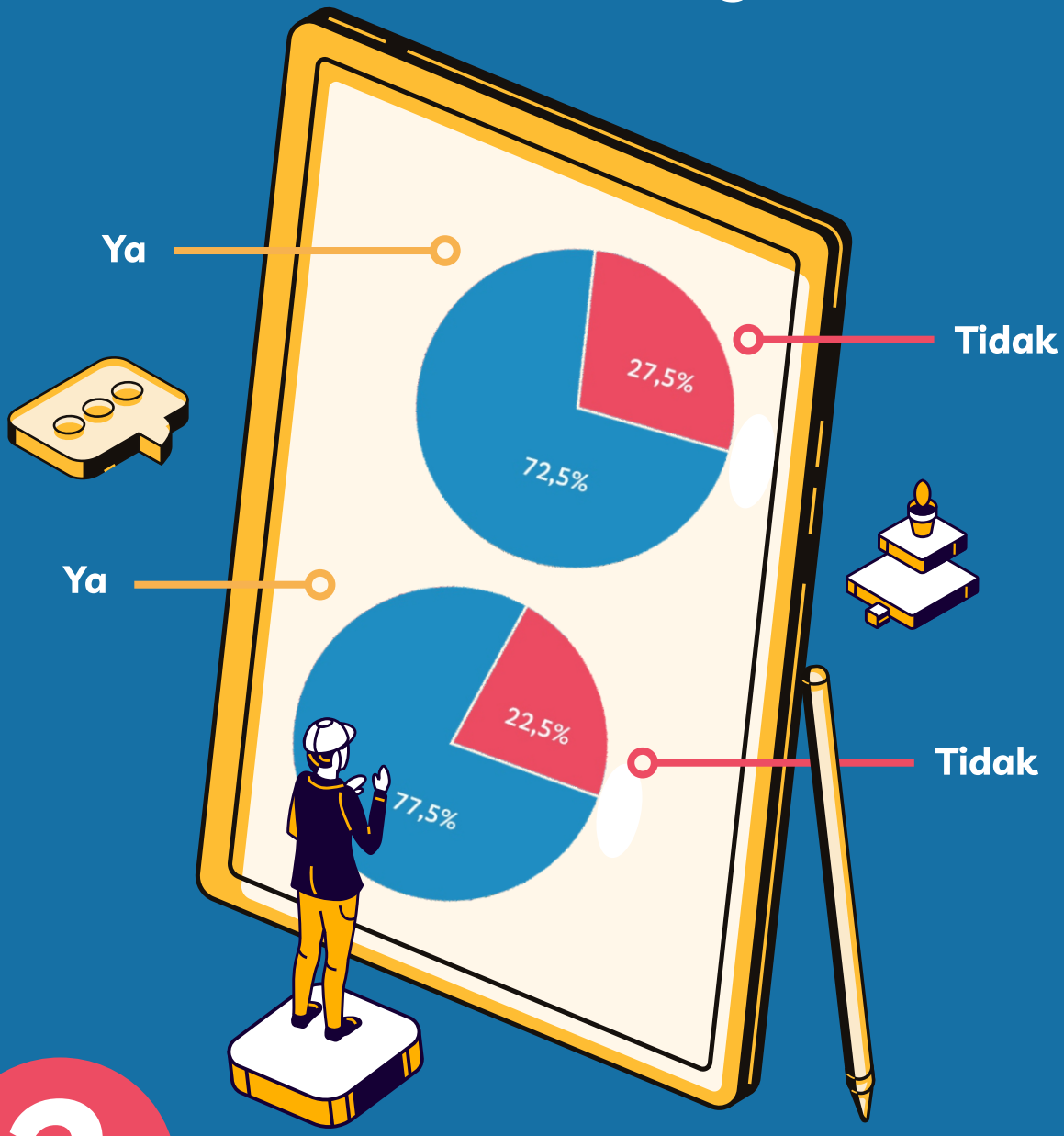

2 Apakah anda pernah melihat KBGS terjadi?

3

Bentuk KBGS apa yang pernah kamu lihat?

4

Di Platform apa KBGS yang anda lihat terjadi?

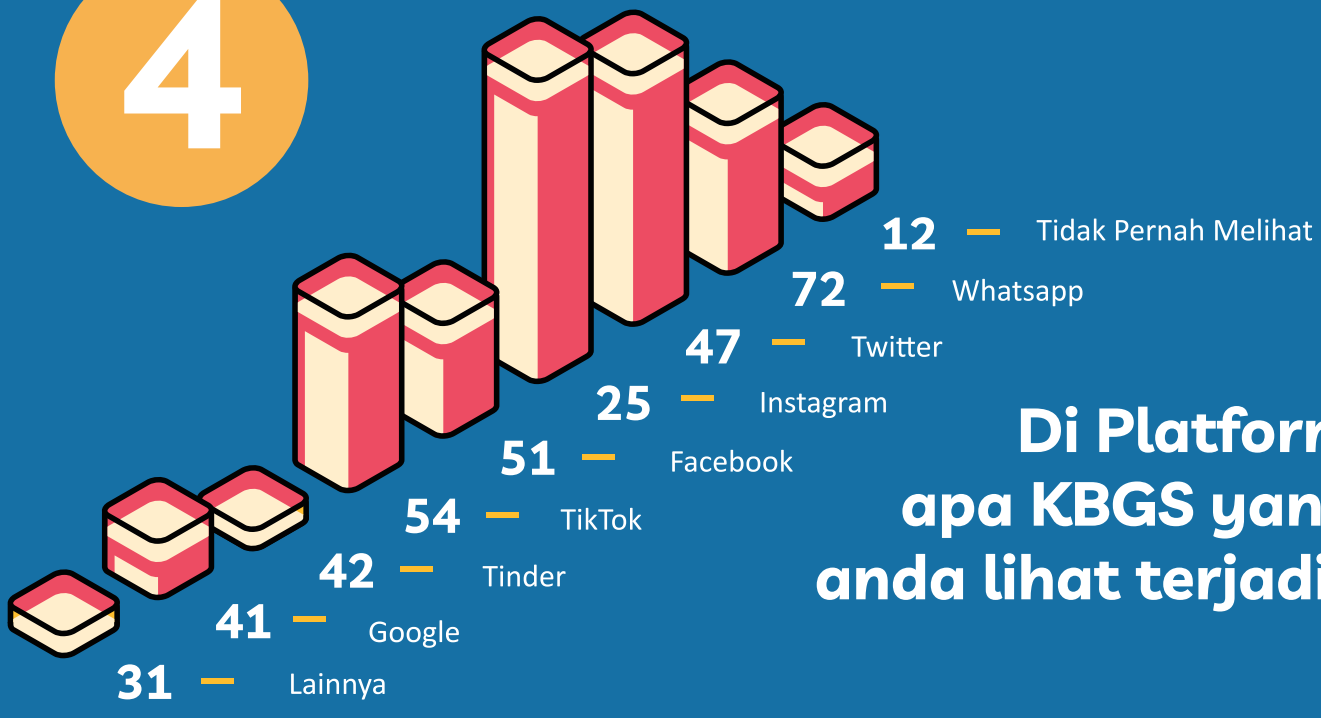

5 Setelah melihat kejadian tersebut, apa yang kalian lakukan?

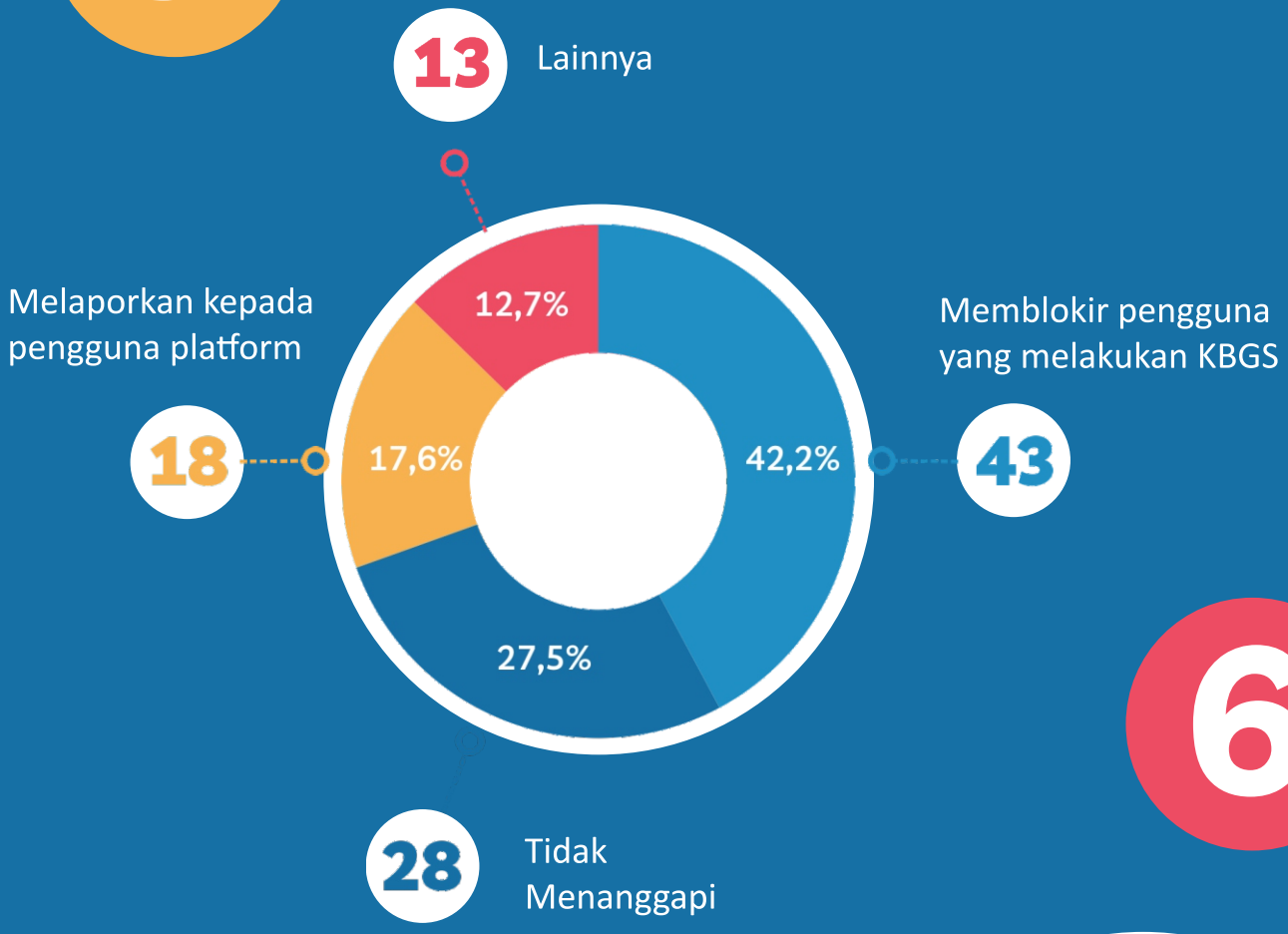

6 Apakah anda pernah menjadi korban KBGS?

7 Bentuk KBGS apa yang pernah anda alami?

- Pemalsuan Identitas
- Ujaran Kebencian
- 1 Peretasan
- Ancaman Penyebaran Foto atau Video Pribadi
- 3 Penyebaran berita bohong
- 3 Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik
- 5 Penggunaan Teknologi untuk Menguntit atau Memantau Aktivitas
- 12 Pelecehan Siber

8 Di Platform apa KBGS tersebut anda alami?

- WhatsApp
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- TikTok
- Tinder
- Google
- Line
- Lainnya

9 Siapa yang menjadi pelaku tindakan KBGS tersebut?

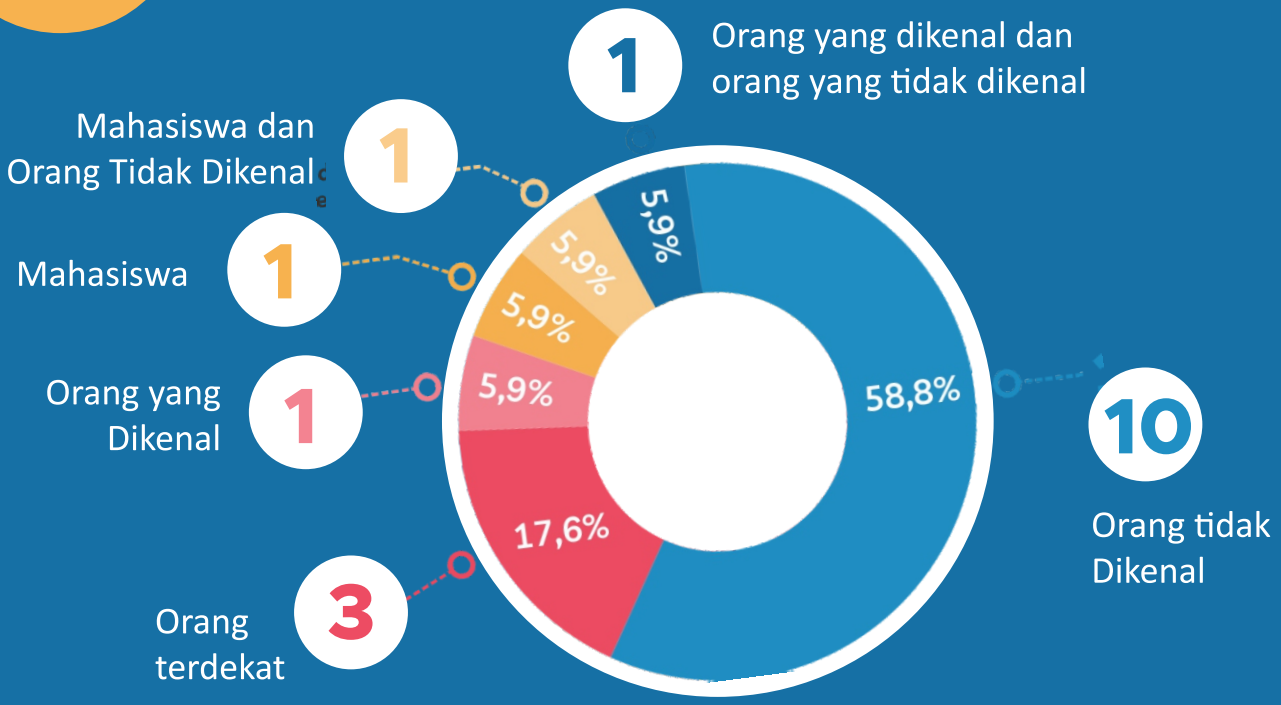

10 Apakah anda melaporkan KBGS yang anda alami?

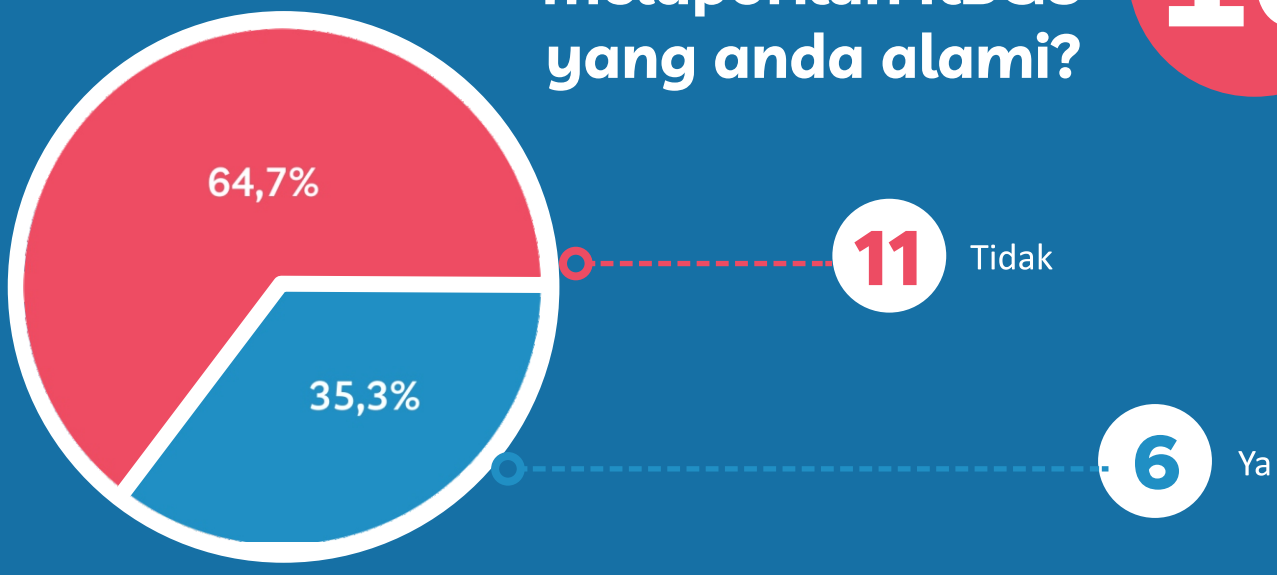

11 Jika Iya, kepada siapa anda melaporkan KBGS yang anda alami?

Orang Terdekat	5
Komnas Perempuan	1
Pihak Berwajib	1
Organisasi	1
Tidak Melaporkan	9

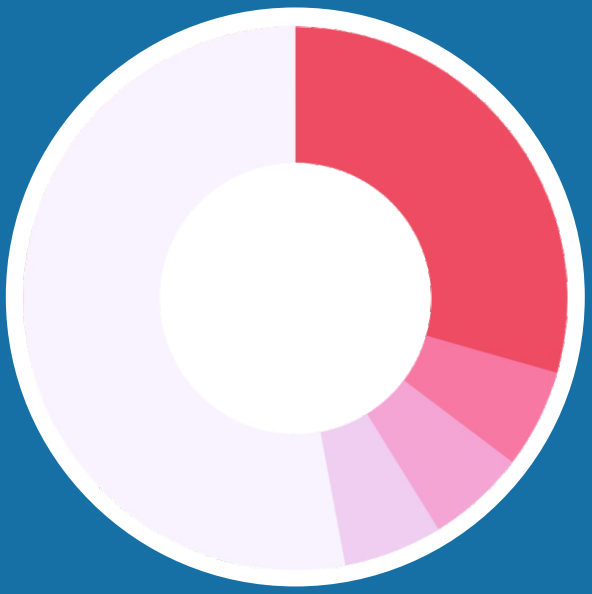

12 Jika tidak, mengapa anda memutuskan untuk tidak melaporkan KBGS yang anda alami?

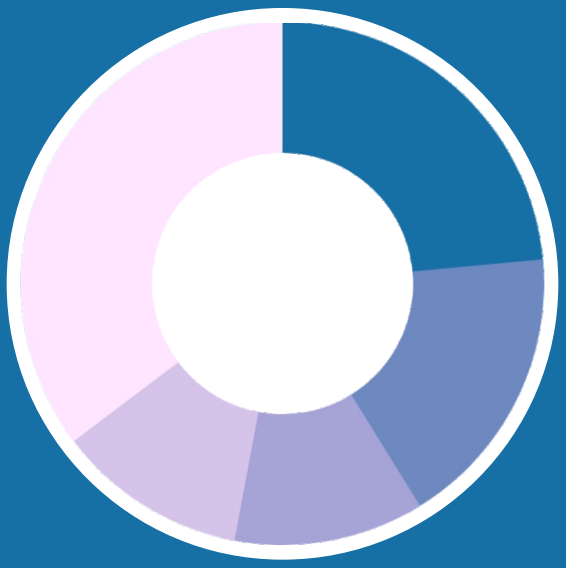

4	Tidak ingin memperbesar masalah
2	Takut dengan pelaku
2	Tidak tahu harus melapor ke mana
2	Lainnya
6	Melaporkan

13 Bagaimana kasus KBGS tersebut terselesaikan?

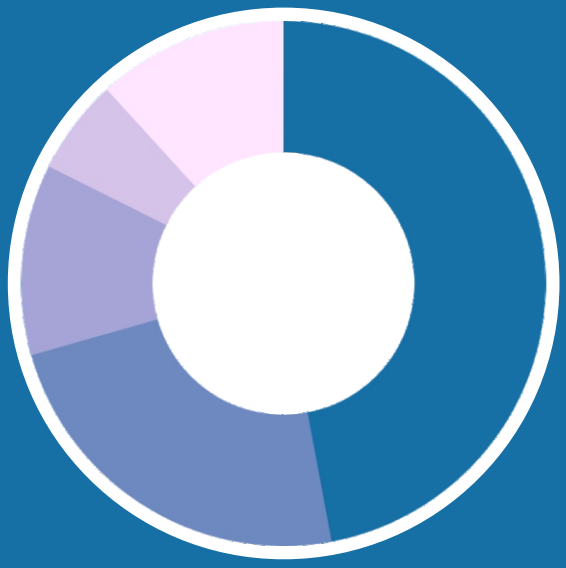

- Tidak ada penyelesaian 8
- Korban memblokir kontak pelaku 4
- Pelaku berhenti begitu saja 2
- Ditangani sesuai SOP organisasi 1
- Lainnya 2

Saran dan Tanggapan terkait KBGS di Lingkungan Universitas Mulawarman

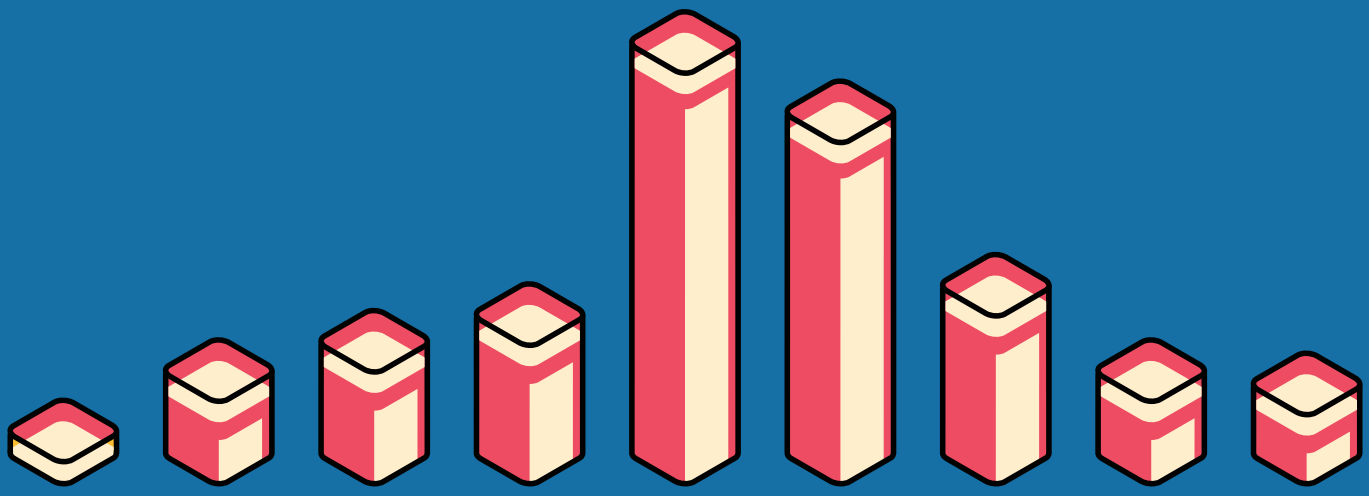

- 29 Perlunya tindakan tegas kepada pelaku
- 24 Berharap tidak ada lagi KBGS
- 12 Adanya wadah bagi korban
- 10 Tidak menormalisasikan KBGS
- 8 Pelaku dapat dilaporkan ke pihak berwenang
- 6 Dilakukannya sosialisasi mengenai KBGS
- 6 Tidak menjawab
- 5 Lebih bijak bersosial media
- 2 Tidak mengetahui

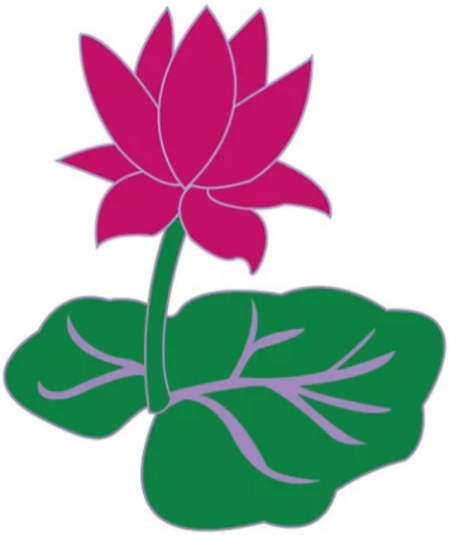

HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA

Sumber : www.hwdi.org

HWDI Kaltim, Rini: Rentan Bukan Berarti Tak Mandiri

"Perempuan disabilitas adalah orang-orang yang memiliki hambatan secara sensorik ataupun fisik. Kami harap, masyarakat luas menganggap keberadaan kami sebagai kelompok difabel. Kami ingin diberi kepercayaan dan kesempatan layaknya orang-orang normal lainnya,"

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Timur (HWDI Kaltim), Rini Istanti, saat ditemui di Aula H. Asrab Bulkis Dinas Sosial Provinsi Kaltim pada Sabtu (26/3) lalu.

Perempuan yang aktif berkegiatan pada organisasi pemenuhan hak-hak disabilitas itu mengungkap sulitnya hidup sebagai perempuan disabilitas lantaran diskriminasi ganda yang kerap mereka alami. Mereka acap kali dipandang rendah sebab gender dan keterbatasan fisik yang dimiliki.

Tak jarang, sebagian dari mereka mengalami kesulitan untuk mengenyam pendidikan ataupun mendapat pekerjaan, akibat stigma negatif dan stereotip yang disematkan. Berangkat dari polemik tersebut, kelompok difabel perempuan terus berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak mereka.

Dengan keramahannya, Rini membagikan cerita kepada Sketsa bagaimana HWDI lahir. Berasal dari tuntutan para perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, organisasi itu kemudian didirikan di Jakarta pada 1997 silam. Hadir sebagai ruang aman dalam pemberdayaan perempuan difabel di Indonesia, mayoritas dari pengurus dan anggotanya adalah perempuan

dengan berbagai ragam disabilitas baik secara fisik, sensorik, mental, hingga intelektual.

Meski telah lama berdiri, HWDI yang bertempat di Kaltim rupanya baru aktif berjalan mulai Januari 2022 lalu. Belum lama, pengurusnya kini tengah merancang kegiatan-kegiatan yang dapat merangkul teman-teman disabilitas perempuan. Lebih lanjut, mereka tengah menggaet mitra untuk menyelenggarakan kegiatan yang akan direncanakan. Demi menjalankan kegiatan yang progresif, HWDI juga mencanangkan kolaborasi dengan organisasi serupa.

Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 yang mencakup asas-asas hidup bermartabat, pendidikan, dan aksesibilitas, pemerintah turut berperan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja. Disebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerha (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dan 1 persen bagi perusahaan swasta.

Angka itu agaknya memvalidasi bahwa di Indonesia, kesempatan masih minor bagi kelompok difabel. Rini menyebut ikhtiar pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas yang tengah diupayakan, demi mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan penyandang disabilitas, utamanya perempuan.

Di Kaltim sendiri, Pemda tampaknya memberikan perhatian yang serius pada kelompok penyandang disabilitas. Itu tertulis pada visi misi Kaltim Berdaulat oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, pada poin pertama yakni berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Tak hanya itu, pemerintah Kaltim turut menunjukkan dukungan kepada penyandang disabilitas di bidang olahraga. Tahun lalu, Gubernur Kaltim telah mengakomodasi atlet difabel untuk mengikuti Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI yang dihelat di Papua.

Rini menganggap Pemda telah memberikan perhatian. Terkait kelompok penyandang disabilitas perempuan, Ia menyebut Dinas Kependudukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Anak (DKP3A). Lembaga yang turut menaungi perempuan disabilitas, khususnya mereka yang mengalami kekerasan. Ia berharap lembaga lainnya dapat memberi perhatian serupa, seperti kemudahan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

"Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang rentan dan memerlukan bantuan. Namun, bukan berarti kaum difabel tidak mandiri dan tidak bisa berusaha sendiri. Sehingga kami harap instansi lain dapat memberi kemudahan aksesibilitas bagi kaum difabel," tegas perempuan berkacamata itu.

Kehadiran penyandang disabilitas kerap dipandang sebelah mata bagi kelompok yang tak menyoroti isu keberagaman. Hingga hari ini, sekelumit aspirasi ini ialah untuk dipandang setara dan dianggap keberadaannya di lingkungan sosial. Perihal kesuksesan yang sering mengundang iba, Rini menegaskan bahwa itu dapat tercapai apabila mereka mendapat kepercayaan dan diberi kesempatan tanpa diskriminasi.

Sebagai fasilitator bagi perempuan difabel, besar harapannya agar pengurus dari HWDI Kaltim

dapat bekerja secara optimal demi jalannya organisasi yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Keberadaan HWDI di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia turut menjadi impiannya.

Meskipun baru seumur jagung, HWDI Kaltim tak serta-merta lepas dari kendala dalam usaha mewujudkan visi dan misi. Dalam penuturannya, bagian internal organisasi menjadi utama yang tengah dibenahi. Baginya diperlukan keselarasan langkah dan tujuan dari setiap anggota organisasi agar dapat mencapai visi dan misi. Kesigapan untuk saling menyiarkan peluang pun diperlukan. Seperti halnya, beasiswa LPDP bagi kelompok difabel oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani untuk menempuh pendidikan tinggi.

Berbagai kesempatan serupa lainnya tentu amat dinantikan, kelompok difabel diharap mendapat ruang dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan mendapat pekerjaan yang layak.

Tim Liputan: Audrey Apridella Moudini, Marcello Ahimsa Hayamaputra, Muhammad Razil Fauzan.
Editor: Khoirun Nisa

Ilustrasi: Freepik

Potret Perempuan Melalui Aksi Kamisan Kaltim

Kamis (31/3) lalu, Aksi Kamisan Kaltim hadir untuk memperingati Hari Karst Nasional. "Hentikan Merusak Sangkulirang-Mangkalihat (karst bukan semen)" jadi tajuk yang digaungkan saat itu. Sketsa menyelisik bagaimana keterlibatan perempuan dalam aksi Kamisan.

"Kami tidak membatasi, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kita menyeimbangkan kesetaraan gender, tidak pernah melakukan (perbedaan perlakuan) hanya laki-laki saja yang boleh naik mau berorasi atau testimoni, perempuan juga boleh," itulah yang dilontarkan oleh pengurus Aksi Kamisan Kaltim, Bachtiar kala itu.

Aksi Kamisan sendiri terbentuk tak lepas dari keberadaan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) dalam menjalankan programnya. Perwujudan dari aksi ini mengarah kepada aksi damai dengan bentuk demonstrasi diam disertai payung hitam bertuliskan tuntutan-tuntutan penyelesaian kasus.

Setiap minggunya, Aksi Kamisan Kaltim memiliki tema berberda. Peran perempuan dalam pengurusan aksi ini cukup besar walaupun dari segi kuantitas tak sebanyak kaum pria di dalamnya.

"Kebanyakan dari mereka yang hadir dikarenakan adanya ajakan, untuk kesadaran diri sendiri menyuarakan isu itu masih minim," ungkap Jamiah, salah satu yang ikut andil dalam Aksi Kamisan tersebut.

Berbagai macam upaya dilakukan dalam aksi kamisan ini, selain membuka ruang berbicara dan berorasi, mereka juga melakukan diskusi-diskusi menyoal kekerasan seksual yang dialami perempuan dan kesetaraan gender. Harapan dengan dibukanya wadah seperti ini, perempuan bisa aktif menyampaikan aspirasi tidak hanya di saat-saat tertentu, seperti peringatan International Women's Day.

Tim Liputan: An Nisa, Zaynab Army Sijaya, Erzha Tegar Hati
Editor: Nindiani Kharimah

LENSA

G20

AKSI KAMISAN KALTIM
MELAWAN DARI MAHAKAM
#melawandarimahakam
HENTIKAN MERUSAK
KARST BUKAN UNTUK $EMEN

AKSI KAMISAN KALTIM
MELAWAN DARI MAHAKAM
#melawandarimahakam

AKSI KAMISAN KALTIM
MELAWAN DARI MAHAKAM
#melawandarimahakam

MAJALAH

Sketsa

Suara Kritis & Edukatif Mahasiswa